



Edisi 1 Juni 2026

STRATEGI MEMBANGUN DAYA-SAING BANGSA

Laporan Riset Dr Jan Hoesada,
Komite Kerja KSAP

I. PENDAHULUAN

Disimpulkan di muka bahwa daya-saing bangsa sangat dipengaruhi kualitas/iklim demokrasi, budaya positif bangsa dan rerata pendidikan angkatan kerja, lalu endowment anugerah Tuhan di tambahkan. Disimpulkan bahwa daya-saing NKRI cukup memuaskan dan masih dapat terus ditingkatkan. Makalah terkait makalah-makalah penulis yang lain berjudul Makalah LAKIP, Makalah SDG dan Makalah Negara tertinggal SDG.

Seperti biasa, sekitar 20 tahun terakhir makalah penulis berbasis riset-maya sebagai Komja KSAP disajikan pada situs KSAP pada Kementerian Keuangan bertujuan untuk (1) mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan daya-saing NKRI, (2) memberi latar-belakang atau bahan masukan memadai bagi KSAP untuk menyusun Standar Akuntansi Kepemerintahan NKRI, (3) memberi dasar bagi pelaku akuntansi kepemerintahan untuk membukukan berbagai dimensi APBN/D, mendukung raihan LKPP/D berkualitas, (4) sebagai rujukan akademisi dalam menyusun bahan ajar, sumber gagasan riset dan karya-akhir akademis, (5) dimaksud untuk memberi kemudahan bagi K/L dan Pemda membuat pedoman daya-saing, dan (6) memberi kesadaran publik cq pemerhati KSAP agar berakuntansi-kepemerintahan nan-baik.

Seperti biasa, penulis mengaku bahwa makalah naif-dangkal dibatasi kemampuan penulis dalam memilih dan merangkai berbagai sumber yang dianggapnya afdol, durasi pengumpulan bahan hanya sekitar 3 bulan, sambil selalu mengingatkan sidang-pemcaca bahwa banyak sekali sumber bermutu yang mungkin tak terbaca penulis atau sumber yang melarang dirujuk/dikuotasi atau kuotasi-berizin, sehingga sidang pembaca terkasih disarankan mencari info lain dari berbagai sumber yang tak terkuotasi penulis, demi kejayaan NKRI tentu saja.

Terdapat kerangka pengukuran versi GCI 2019 mencakupi 4 Komponen Utama yaitu Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar, dan Ekosistem Inovasi dan 12 Pilar yang mencakup faktor seperti kinerja ekonomi, kebijakan fiskal, kesehatan, keterampilan, sistem keuangan, dinamika bisnis, inovasi, dll. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)versi

BRIN; mengukur daya saing di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan metodologi yang selaras dengan GCI bertujuan untuk menyediakan data dasar tahunan untuk perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

Berdasarkan berbagai laporan, daya saing, Singapura (718 Km Persegi) sering kali berada di peringkat teratas, bersama negara-negara seperti Swiss dan Denmark. Sementara itu, negara dengan daya saing terendah dapat bervariasi tergantung pada kriteria dan tahun laporan, tetapi Chad dan Sudan Selatan sering disebutkan karena faktor-faktor seperti korupsi, konflik, dan kemiskinan.

Negara dengan daya saing terbaik

- Singapura: Sering menduduki peringkat teratas dalam berbagai indeks daya-saing.
- Swiss: Berada di posisi teratas dalam laporan daya saing ekonomi dan digital.
- Denmark: Sering kali masuk dalam 10 besar negara dengan daya-saing terbaik.

Singapura sering disebut sebagai negara terkaya berdasarkan PDB per kapita, sementara Luksemburg berada di posisi teratas untuk PDB per kapita menurut laporan IMF tahun 2025.



Negara dengan daya saing terburuk

- Chad: Disebutkan sebagai negara yang tidak kompetitif karena korupsi, kurangnya akses ke sumber pembiayaan, dan kondisi teknologi yang buruk.
- Sudan Selatan: Meskipun kaya sumber daya alam, negara ini dianggap salah satu yang termiskin karena konflik-domestik dan korupsi.

Negara termiskin di dunia, yang seringkali juga memiliki kondisi paling buruk, sangat bervariasi tergantung metrik yang digunakan. Namun beberapa negara yang secara konsisten masuk daftar adalah Sudan Selatan,

Burundi, dan Republik Afrika Tengah. Selain itu, negara seperti Yaman, Republik Demokratik Kongo, Mozambik, dan Niger juga sering disebut karena kemiskinan ekstrem dan krisis kemanusiaan mereka yang parah.

Menurut Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum/WEF*), daya saing global didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memberikan tingkat kemakmuran yang tinggi kepada warganya, yang bergantung pada seberapa produktif negara tersebut memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Model ekonomi yang berbeda menciptakan lingkungan yang berbeda pula untuk mendorong produktivitas bangsa. Pakar ilmu strategi; Michael Porter mendefinisikan daya-saing bangsa sebagai kemampuan negara dalam menciptakan nilai tambah berkelanjutan melalui kegiatan kelembagaan cq perusahaan untuk menjaga kualitas hidup warga. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengartikan daya saing sebagai kemampuan negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi warganya. European Commission mendefinisikannya sebagai ukuran keunggulan atau kelemahan komparatif negara dalam penjualan produk di pasar internasional. Krugman menganggap dayasaing sebagai cara meningkatkan produktivitas bangsa untuk mendongkrak standar hidup melalui peningkatan produktivitas

dan kreativitas. Sumber lain mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan menghasilkan produk dan jasa berkualitas tinggi dengan biaya lebih rendah dari pesaing di pasar domestik maupun internasional.

Penulis merumuskan daya-saing bangsa sebagai segala bentuk kualitas konstitusi & UUD



bangsa, cita-cita atau visi bangsa, budaya-bangsa, segala sumber-daya bangsa itu dan segala kemampuan-khas bangsa itu yang tak dimiliki bangsa lain untuk perebutan peluang meraih kemakmuran masa-depan bangsanya secara lebih efektif cepat dibanding bangsa lain pada tataran-global.

Bagi penulis, sumber-daya bangsa asli yang terbatas dapat ditambah, diperbanyak, diperluas, diperkaya melalui tata-cara & hukum-internasional untuk perolehan konsesi/ franchise/sewa/kontrak berbagai hak-tambang di LN, pembelian lisensi/hak-paten atau hak-cipta intelektual asing, menerapkan hampiran patok-duga/benchmarking dengan kebijakan buka-pintu bagi PMA bersyarat alih-teknologi, hampiran

akuisisi atau merger dengan entitas asing, bantuan pakar asing, kebijakan *benchmarking* cq buka-pintu TK profesional asing tertentu sebagai “guru praktik” TK DN, dahulu dengan hampiran kolonialisasi/penjajahan.

Bagi penulis, reformasi SDM cq Ketenagakerjaan NKRI dilakukan dengan *benchmarking* kurikulum/gaya/hampiran/ budaya-sekolah terbaik di muka-bumi seperti pada negara-negara Benelux tertentu, reformasi pendidikan melalui *benchmarking* negara ber SLTP/SLTA terbaik dan guru-terbaik di muka-bumi, misalnya Jepang, program link & match yang mengambang ditingkatkan dengan program-membumi penyediaan tempat-kerja bagi calon-lulusan akademis dengan kerja-sama dunia pendidikan-Kadin-Asosiasi Pengusaha dll untuk mencapai status pemerkerjaan paripurna (*full employment*) NKRI, dan ancaman lain.

Sumber AI menyatakan bahwa menurut pemerintah Indonesia, daya saing bangsa didefinisikan secara kontekstual dalam kerangka pembangunan nasional dan kemampuan ekonomi di kancah global, bukan melalui satu kalimat definisi tunggal yang terstandardisasi.

Konsep ini merujuk pada:

- Kemampuan produk Indonesia untuk bersaing di pasar internasional secara berkelanjutan
- Seperangkat lembaga/institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara.
- Kemampuan untuk menghasilkan faktor pendapatan nasional dan peluang / lapangan kerja yang makin tinggi secara berkesinambungan lintas periode.
- Perpaduan aset seperti sumber daya alam, teknologi, budaya bangsa, dan SDM menciptakan kompetensi inti dalam menghadapi globalisasi.

Pemerintah berfokus pada pembangunan pilar-pilar utama untuk meningkatkan daya-saing bangsa, seperti:

- Pembangunan infrastruktur nan-kompetitif dibanding negara lain.
- Reformasi hukum dan aparatur negara nan-kompetitif dibanding negara lain.
- Peningkatan kualitas APBN/D terus menerus.
- Peningkatan kualitas tenaga-kerja sektor formal dan kesiapan teknologi.

Secara ringkas, pemerintah memandang daya saing bangsa sebagai kemampuan holistik negara untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan produktivitas bangsa, versi *Institute for Management Development (IMD)* dan *World Economic Forum (WEF)* Cynthia Churchwell, 2004, menyajikan artikel berjudul *The Competition of Countries*, sumber Economics and Global Commerce, mengupas pendapat HBS professor Richard H. K. Vietor, sebagai berikut:

- Untuk meraih sukses pada panggung-global, bangsa/negara perlu membentuk/memformulasikan strategi-pengembangan/pembangunan perekonomian bangsa.
- Singapura dan Jepang adalah negara miskin SDA, dalam 30 tahun berhasil membangun kemakmuran bangsa berbasis ekspor, tabungan dan investasi.
- Terdapat bangsa/negara kaya SDA dan berposisi geografis strategis di muka-bumi, mengalami pertumbuhan ekonomi mengecewakan karena kegagalan membentuk kelembagaan pemerintahan nan-baik dan/atau gagal menemukan/mencipta faktor pemicu produktivitas bangsa.
- Unsur daya-saing bangsa adalah kemampuan membentuk/menggalang modal SDM dan menekan biaya perunit output ber-nilai tambah terbesar.

II. KEMENTERIAN / LEMBAGA NEGARA TERKAIT DENGAN MANAJEMEN DAYASAING NKRI

Bagi Jepang, daya saing bangsa terkait pada tugas Menkeu dan Menteri Prindustrian saja. Menurut AI, Kementerian Koordinator utama yang mengurus daya saing NKRI adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, karena kementerian ini mengoordinasikan berbagai kebijakan lintas kementerian keuangan, perindustrian dan perdagangan yang paling berdampak langsung pada perekonomian dan industri tulang-punggung.

Berikut adalah daftar para Menko dan Kementerian/Lembaga (KL) yang terkait erat dalam upaya meningkatkan daya saing nasional di bawah Kabinet Merah Putih saat ini:

Menteri Koordinator Terkait Daya Saing

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto. Bidang ini memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, deregulasi, hilirisasi, dan investasi yang merupakan pilar utama daya saing bangsa.
- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Membangun ketahanan dan daya saing juga melibatkan pembangunan infrastruktur yang efisien dan tangguh.
- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: A. Muhaimin Iskandar. Peningkatan kualitas SDM dan manajemen talenta nasional merupakan aspek penting dari daya saing jangka panjang.

Di bawah koordinasi Menko Perekonomian, beberapa KL yang secara langsung mengimplementasikan kebijakan terkait daya-saing NKRI meliputi:

- Kementerian Ketenagakerjaan: Bertanggung jawab atas kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja.
- Kementerian Perindustrian: Adalah kementerian terpenting untuk pembangunan daya-saing bangsa, berfokus pada output-percapita melalui pilihan industri-strategis, modernisasi dan peningkatan daya saing sektor industri manufaktur.
- Kementerian Perdagangan: Adalah kementerian terpenting kedua untuk pembangunan daya-saing bangsa, antara lain mengurus kebijakan ekspor, impor, dan stabilitas pasar untuk mendukung produk nasional bersaing di pasar global.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Berperan dalam menarik investasi dan mendorong hilirisasi sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing ekonomi.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kompetitif.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Terkait dengan ketahanan energi yang esensial untuk industri yang berdaya saing.

Di bawah koordinasi Menko Perekonomian, beberapa KL yang secara langsung mengimplementasikan kebijakan daya saing meliputi:

- Kementerian Ketenagakerjaan: Bertanggung jawab atas kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja.
- Kementerian Perindustrian: Fokus pada modernisasi dan peningkatan daya saing sektor industri manufaktur.
- Kementerian Perdagangan: Mengurus kebijakan ekspor, impor, dan stabilitas pasar untuk mendukung produk nasional bersaing di pasar global.
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Berperan dalam menarik investasi dan mendorong hilirisasi sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah dan daya saing ekonomi.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kompetitif.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Terkait dengan ketahanan energi yang esensial untuk industri yang berdaya saing.

Selain itu, KL lain seperti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (di bawah Kemenko IPTEK) juga berperan dalam menghasilkan inovasi dan talenta yang mendukung daya saing.

Terkait pembangunan daya-saing bangsa, berbagai KL mempunyai tugas khusus sbb

- Uraian tugas Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk meningkatkan daya saing bangsa NKRI mencakupi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan industri yang berfokus pada pembangunan sumber daya, infrastruktur, teknologi, serta penguatan iklim usaha dan standardisasi. Secara spesifik, tugas Kemenperin dalam mendorong daya saing meliputi:
 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi. Peningkatan Kualitas SDM melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang terampil. Adopsi Teknologi cq mendorong penerapan teknologi modern dan transformasi digital, termasuk inisiatif "Making Indonesia 4.0", untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri nasional.

2. Penguatan Struktur dan Iklim Usaha Industri. Pembangunan Infrastruktur dengan merumuskan kebijakan terkait pembangunan sarana dan prasarana industri serta pengembangan perwilayahan industri.
3. Peningkatan Ketahanan dan Iklim Usaha dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan fiskal, insentif investasi, dan dukungan regulasi untuk menarik investasi dan memastikan industri tumbuh sehat.
4. Kemitraan IKM dan Industri Besar dengan mendorong kemitraan antara Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan industri besar untuk memperkuat rantai pasok dan daya saing IKM.
5. Peningkatan Nilai Tambah dan Standardisasi Produk.
 - 5.1 Peningkatan Nilai Tambah: Mendorong peningkatan nilai tambah produk industri di dalam negeri.
 - 5.2 Penerapan Standardisasi (SNI): Mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk menjamin kualitas produk dan meningkatkan kepercayaan pasar, baik pasar domestik maupun global.
 - 5.3 Pengembangan Akses Pasar Internasional: Melakukan pengembangan akses sumber daya dan pasar industri internasional.
 - 5.4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri: Mendorong penggunaan produk dalam negeri pada berbagai sektor industri.

Secara keseluruhan, tugas Kemenperin diarahkan untuk membangun sektor industri manufaktur yang kokoh, berdaya saing global, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan strategis dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Perindustrian.

Dalam konteks peningkatan daya saing bangsa Indonesia (NKRI), uraian tugas kementerian tersebut mencakup beberapa peran kunci, antara lain:

Peningkatan Kinerja Perdagangan Luar Negeri

- Peningkatan dan Fasilitasi Ekspor: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan ekspor produk non-migas yang bernilai tambah, termasuk produk pertanian, kehutanan, industri, dan pertambangan.
- Perluasan Akses Pasar Internasional: Melakukan diplomasi ekonomi dan membuat perjanjian perdagangan internasional untuk memastikan produk Indonesia diterima di pasar global, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat.
- Promosi Dagang: Menyelenggarakan dan memfasilitasi pameran dagang internasional (seperti Trade Expo Indonesia/TEI) untuk mempromosikan produk dalam negeri dan mempertemukan eksportir dengan pembeli global.
- Diversifikasi Produk Ekspor: Mendorong diversifikasi produk ekspor unggulan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu.

Peningkatan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri

- Penguatan Pasar Domestik: Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri untuk menciptakan pasar yang kuat sebagai basis sebelum produk didorong ke pasar global.
- Pembinaan dan Fasilitasi Produk Dalam Negeri: Berperan sebagai fasilitator untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, termasuk pembinaan manajemen keuangan, legalisasi, dan sertifikasi produk (seperti PIRT dan Sertifikat Halal bagi pasar berbasis agama) bagi UMKM.

- Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi: Melakukan analisis dan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di dalam negeri.

Penciptaan Ekosistem Perdagangan yang Kondusif

- Deregulasi dan Kemudahan Berusaha: Merelaksasi kebijakan terkait ekspor-impor untuk memberikan kemudahan berusaha dan memperkuat daya saing industri nasional.
- Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga: Melaksanakan kebijakan perlindungan konsumen dan menjaga ketertiban niaga untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan aman.
- Pengembangan SDM dan Inovasi: Melalui berbagai program, kementerian berupaya meningkatkan kompetensi SDM pelaku usaha dan mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang didukung teknologi informasi.

Secara keseluruhan, Kementerian Perdagangan berfokus pada perumusan dan penetapan kebijakan strategis untuk memperkuat infrastruktur ekonomi negara, baik dari sisi hulu (produksi) maupun hilir (pemasaran), guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing bangsa di pasar global.

Tugas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk meningkatkan daya saing bangsa NKRI secara umum mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan fokus pada peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, secara spesifik meliputi:

- Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja: Merencanakan dan melaksanakan program pelatihan kerja (vokasi) secara masif untuk membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk melalui program pemagangan nasional yang bekerja sama dengan industri. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan SDM yang berdaya saing di tingkat nasional dan global.
- Perencanaan Ketenagakerjaan: Melakukan analisis dan penyusunan rencana tenaga kerja nasional untuk memastikan ketersediaan dan penyerapan tenaga kerja yang seimbang dengan kebutuhan pasar.
- Perluasan Kesempatan Kerja: Merencanakan program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk pengelolaan transmigrasi.
- Penguatan Hubungan Industrial dan Perlindungan: Menciptakan iklim kerja yang kondusif melalui penguatan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja (termasuk K3), dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk menjaga stabilitas dan produktivitas.
- Pengembangan Produktivitas: Menegaskan produktivitas nasional sebagai kunci lompatan daya saing Indonesia melalui berbagai strategi dan kebijakan.
- Penyelenggaraan Jaminan Sosial: Memastikan pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya untuk meningkatkan kesejahteraan, yang secara tidak langsung berdampak pada produktivitas kerja.

Secara keseluruhan, peran Kemnaker adalah memastikan terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif untuk membangun fondasi SDM yang kompeten dan produktif, yang pada akhirnya akan mendorong daya saing bangsa Indonesia secara berkelanjutan.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memegang peran sentral dalam tugas meningkatkan daya saing bangsa NKRI melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelaksanaan kebijakan hilirisasi industri sebagai berikut:

- Peningkatan Iklim Investasi: Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional. Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi dan mengadvokasi pelaksanaan penanaman modal, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- Hilirisasi Industri: Mengoordinasikan hilirisasi investasi strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan nilai tambah komoditas, dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
- Penguatan UMKM: Melakukan inovasi perbaikan dengan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM) untuk membangun ekosistem industri yang sinergi dengan industri besar, yang secara langsung berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing nasional.
- Penyusunan Kebijakan Pro-Investasi: Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang investasi, termasuk mengesahkan UU Cipta Kerja dan mengeluarkan Daftar Prioritas Investasi (DPI), serta memberikan insentif fiskal untuk sektor-sektor prioritas guna menarik investasi berkualitas.
- Pengawasan Proyek Besar: Mengawal proyek investasi besar, termasuk proyek strategis nasional seperti smelter, untuk memastikan realisasi investasi yang tinggi dan berkualitas.
- Peningkatan Kualitas SDM dan Lapangan Kerja: Investasi yang masuk diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong transfer teknologi, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, Kementerian Investasi bertindak sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor, berupaya menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik dan kompetitif secara global.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memainkan peran sentral dalam meningkatkan daya saing NKRI melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, perumusan kebijakan fiskal yang strategis, dan investasi pada sektor-sektor kunci.

- Pengelolaan Fiskal dan Stabilitas Ekonomi: Kinerja keuangan negara yang kuat adalah landasan utama daya saing. Kemenkeu menjaga stabilitas fiskal, mengelola anggaran secara efisien, dan mengoptimalkan pendapatan negara (pajak dan PNBPN) untuk membangun fondasi ekonomi yang kokoh. Kebijakan keuangan yang adaptif membantu negara merespons tantangan ekonomi global dengan cepat.
- Investasi Infrastruktur dan SDM: Belanja negara diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing jangka panjang.
- Reformasi Kebijakan dan Transformasi Digital: Kemenkeu menerapkan reformasi fiskal yang berkelanjutan dan mendorong inovasi serta digitalisasi sistem keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- Fasilitasi Perdagangan dan Investasi: Melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kemenkeu berperan dalam melancarkan arus barang ekspor-impor, yang secara langsung berdampak pada daya saing produk Indonesia di pasar global. Kemenkeu juga berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti Kementerian Investasi/BKPM, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

- Kerja Sama Internasional: Kemenkeu memantapkan peran internasionalnya dan memperkuat kerja sama global di bidang keuangan, membawa dampak positif bagi ekonomi nasional.

Upaya-upaya ini telah menunjukkan hasil, dengan peringkat daya saing Indonesia dalam IMD Global Competitiveness Index naik dari posisi 44 ke-34 pada tahun 2023.

III. DAYA-SAING BANGSA VERSI IMD

Terdapat berbagai lembaga LSM yang berfokus pada studi daya-saing bangsa. IMD World Competitiveness Ranking (2025) mengumumkan secara berkala para juara daya-saing antara lain :

1. Switzerland: dengan kekuatan kelembangan dan kualitas prasarana publik
2. Singapore: Turun satu tingkat
3. Hong Kong SAR: Naik 2 tingkat.
4. Denmark: Turun satu tingkat
5. United Arab Emirates (UAE): Naik dua tingkat.

Global Talent Competitiveness Index (GTCI) (2025)

1. Singapore: Peringkat pertama untuk pertama kali.
2. Switzerland: Turun dari peringkat pertama.
3. Denmark: Naik ke tingkat ke tiga.
4. Finland: Turun dua tingkat menjadi ke empat.
5. Sweden: Turun empat tingkat menjadi ke lima.

Faktor berpengaruh pada daya-saing bangsa terutama adalah:

- Kinerja ekonomi, termasuk pertumbuhan PDB dan perdagangan internasional.
- Efisiensi pemerintahan dan efektivitas / kemampuan mengelola perekonomian bangsa.
- Efisiensi Bisnis di ukur dari tingkat produktivitas, daya-saing dan kepiawaian manajemen entitas.
- Infrastruktur bangsa, terutama infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi seperti penggunaan internet.

Julie Peasley, 2023, menyajikan artikel berjudul *The World's Top 20 Most Competitive Countries 2019-2023*, antara lain mengungkapkan bahwa lembaga IMD menggunakan empat faktor penilaian daya-saing bangsa, yaitu faktor kinerja-ekonomi, efektivitas-efisiensi pemerintahan, efektivitas-efisiensi bisnis dan kualitas infrastruktur bangsa.

Peringkat daya saing amat turbulen, dapat berubah tiap saat. Perubahan daya-saing relatif dibanding bangsa-bangsa lain terjadi tiap tahun, misalnya sebagai berikut.

Country	2019 Ranking	2020 Ranking	2021 Ranking	2022 Ranking	2023 Ranking
Australia	18	18	22	19	19
Austria	19	16	19	20	24
Belgium	27	25	24	21	13
Canada	13	8	14	14	15
China	14	20	16	17	21
Czech Republic	33	33	34	26	18

Country	2019 Ranking	2020 Ranking	2021 Ranking	2022 Ranking	2023 Ranking
Denmark	8	2	3	1	1
Finland	15	13	11	8	11
France	31	32	29	28	33
Germany	17	17	15	15	22
Hong Kong SAR	2	5	7	5	7
Iceland	20	21	21	16	16
Ireland	7	12	13	11	2
Israel	24	26	27	25	23
Luxembourg	12	15	12	13	20
Netherlands	6	4	4	6	5
New Zealand	21	22	20	31	31
Norway	11	7	6	9	14
Qatar	10	14	17	18	12
Singapore	1	1	5	3	4
Sweden	9	6	2	4	8
Switzerland	4	3	1	2	3
Taiwan, China	16	11	8	7	6
UAE	5	9	9	12	10
USA	3	10	10	10	9

Sumber: <https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/2023/>

Berdasarkan laporan terbaru dirujuk AI, peringkat daya saing bangsa secara global untuk tahun 2025 menunjukkan penurunan signifikan bagi Indonesia ke peringkat 40 dari 69 negara, turun 13 peringkat dari tahun sebelumnya. Sementara itu, negara-negara dengan daya saing tertinggi secara global adalah Singapura, Swiss, dan Denmark, sedangkan di kawasan ASEAN, peringkat Indonesia berada di urutan kedua terbawah.

Menurut versi IMD yang amat relatif, peringkat Indonesia: 40 dari 69 negara, turun 13 peringkat dari posisi 27 pada 2024.

- Penyebab penurunan:
 - Efisiensi pemerintah: Turun dari peringkat 23 menjadi 34.
 - Efisiensi bisnis: Turun 12 peringkat ke posisi 26.
 - Infrastruktur: Turun lima peringkat ke posisi 57.

Peringkat daya saing global 2025 (tertinggi)

- Singapura: Peringkat 1 secara keseluruhan dan peringkat pertama dalam hal daya saing di bidang teknologi.
- Swiss: Peringkat 2 secara keseluruhan dan peringkat pertama dalam hal daya saing di bidang teknologi, mengungguli Singapura.
- Denmark: Peringkat 3.
- Finlandia: Peringkat 4.
- Swedia: Peringkat 5.

Sumber AI yang lain menyatakan bahwa pada tahun 2025, peringkat daya saing Indonesia merosot dari posisi ke 27 ke posisi 40 dari 69 negara dalam daftar, turun 13 peringkat dari tahun sebelumnya (peringkat 27) menurut laporan *World Competitiveness Ranking (WCR) 2025* dari IMD.

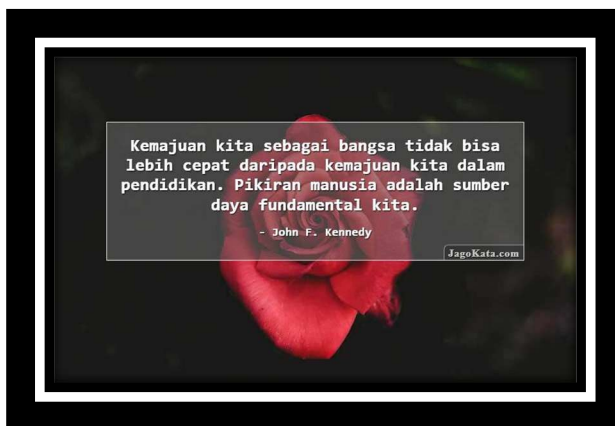
Penurunan ini menurut IMD disebabkan oleh sejumlah faktor seperti birokrasi yang tidak efisien, lambatnya reformasi struktural, dan masalah di sektor infrastruktur serta efisiensi bisnis.

Peringkat Daya Saing Indonesia 2025:

- Peringkat Global: urutan 40 dari 69 negara
- Penurunan: Turun 13 peringkat dibandingkan tahun 2024 (peringkat 27)
- Peringkat di ASEAN: Berada di peringkat ke-4, di bawah Singapura (2), Malaysia (23), dan Thailand (30)

Faktor Penyebab Penurunan NKRI 2025:

- Efisiensi Pemerintah: Penurunan peringkat pada kerangka kerja institusional, terutama karena efisiensi birokrasi yang dianggap lamban dan tidak efisien.
- Efisiensi Bisnis: Menurunnya efisiensi bisnis karena rendahnya ketersediaan tenaga kerja asing berkualitas, akses layanan finansial, dan tingkat produktivitas tenaga kerja.
- Infrastruktur: Kemunduran di sektor infrastruktur, khususnya infrastruktur teknologi, akibat rendahnya belanja kesehatan, alokasi anggaran pendidikan, jumlah paten, dan kecepatan *bandwidth* internet.



IV. BAGAIMANA BANGSA BERSAING (*HOW COUNTRIES COMPETE*)

Harvard Business School Press menerbitkan karya Richard K. Vietor yang berjudul *How Countries Compete*, 2007, antara lain mengungkapkan strategi, struktur dan pemerintah dalam perekonomian global, sebagai berikut.

Setiap pemerintahan mempunyai strategi pembangunan perekonomian eksplisit/implisit dimana struktur pemerintahan mengikuti strategi terpilih kabinet sesuai kondisi bangsa dan kondisi global.

Kondisi bangsa antara lain budaya bangsa dan sistem legal, kualitas UUD dan falsafah nilai yang dianut, sistem ekonomi, sistem politik/pemerintahan sosialis/kapitalis/campuran, tegaknya hukum dan tingkat keamanan nasional, pendapatan, distribusi pendapatan cq alokasi APBN dan perpajakan, tingkat korupsi, kondisi SDA, kondisi pendidikan formal, dll.

Strategi bangsa sebagai berikut :

- Tujuan abadi bangsa, tujuan jangka-panjang, sasaran jangka menengah & jangka pendek bangsa diformulasikan secara umum dalam khasanah pertumbuhan-ekonomi dan stabilitas-politis, sebagian bangsa merumuskan secara lebih fragmentis dan rinci.
- Implementasi sasaran kabinet jangka-menengah dan pendek di formulasi dalam kebijakan-pemerintah, pasti mencakupi kebijakan makro-ekonomi, kebijakan fiskal (APBN) antara lain kebijakan APBN Berimbang/Defisit Terkendali,
- Revolusi sisi-pasok versi Presiden Ronald Reagan mencakupi empat sasaran yaitu (1) mengurangi inflasi, (2) memperbesar pertumbuhan ekonomi, (3) mengurangi campurtangan pemerintah, dan (4) penguatan keamanan nasional.

- Pilihan kebijakan makro-ekonomi
 1. Pilihan kebijakan fiskal, yaitu surplus APBN, APBN berimbang dan pilihan defisit APBN dengan pilihan (1) peningkatan/pengurangan APBN pertahanan, infrastruktur, kesejahteraan sosial yang berdampak pada peningkatan daya-saing, atau (2) kebijakan perpajakan, belanja konsumsi, mendorong laju investasi dan perkembangan unit-usaha komersial.
- Pilihan kebijakan moneter sebagai sisi-lain dari kebijakan fiskal, berupa kebijakan bank-sentral yang mendorong / mengurangi pasok-uang dalam porsi tertentu, bertujuan agar jumlah uang beredar cukup untuk membiayai pertumbuhan-ekonomi nan-sehat nir-inflasi dan saldo cadangan-devisa ideal, dengan instrumen.
 1. Tarif bunga bank-sentral, tarif deposito publik, tarif kredit perbankan
 2. Manajemen cadangan devisa
 3. Operasi pasar terbuka /OPT (*open market operation*) cq jual-beli obligasi-negara / SUN
- Pilihan kebijakan ekonomi makro melalui manajemen nilai-tukar mata-uang yang meliputi :
 - a. Pilihan kebijakan nilai-tukar mengambang/bebas atau nilai-tukar tetap.
 - b. Penetapan target-berkala apresiasi/depresiasi mata uang domestik cq manajemen kurs
 - c. Manajemen aliran modal asing / dana LN ke DN dengan penetapan target-berkala dan kebijakan makro-ekonomi tertentu

- 4. Pilihan kebijakan-pendapatan negara (*income policy*) melalui pengendalian upah & gaji dan harga-harga (misalnya harga BBM)

- Kebijakan mikro-ekonomi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Kebijakan Mikroekonomi mencakupi :
 - a. Regulasi ekonomi-mikro khusus untuk industri tertentu seperti energi, transportasi, telekomunikasi dan industri sarana-pertahanan. Provisi/subsidi untuk sektor industri tertentu, misalnya subsidi UMKM berbasis ekspor, pembelian produk UMKM sebagai bahan-baku program makan-siang-gratis.
 - b. Kebijakan perniagaan, antara-lain mencakupi
 - i. Kebijakan tarif
 - ii. Kebijakan kuota
 - iii. Kebijakan pembatasan kesepakatan-dagang, misalnya batasan ekspor
 - iv. Kebijakan pajak ekspor (jarang)
 - v. Kebijakan pajak impor dan pengendalian impor non- kebijakan - pajak

- c. Kebijakan restriksi/promosi PMA
 - Restriksi PMA bidang-usaha tertentu untuk perlindungan PMDN dari persaingan.
 - Insentif PMA (1) bidang-usaha tertentu yang tak diminati PMDN dan BUMN, (2) PMA bidang-usaha berteknologi-tinggi tertentu bersyarat alih-teknologi atau PMA teknologi-tinggi tanpa-syarat alih-teknologi dan/atau PMA bersyarat mempunyai pemegang-saham WNI.
 - Kebijakan nasionalisasi/privatisasi/kewajiban *go-public* bagi PMA terprogram dan nasionalisasi-kagetan PMA, sebagai opsi kurang menarik bagi PMA.

V. STRUKTUR BANGSA

Sejarah dunia mencatat bahwa sistem demokrasi dan sistem kapitalisme nan-baik lebih berpeluang membawa kemakmuran bangsa cq PDB dan Penghasilan Perkapita tertinggi dunia. Sistem otoriter adalah sebaliknya, kecuali RRT. Semua sistem pemerintahan nan-kleptokrasi menghasilkan keterpurukan bangsa. Budaya bangsa nanbaik dan merata pendidikan bangsa sebagai landasan perekonomian cq perindustrian adalah segalanya.



- Terdapat struktur organisasi berbangsa/bernegara yang membatasi pilihan kebijakan untuk meningkatkan daya-saing bangsa tersebut di atas, yaitu
 1. Konstitusi organisasi negara berbasis demokrasi atau otkrasi.
 2. Kekuatan dominan partai politik tertentu dalam mengatur negara atau dinamika koalisi antar-partai membentuk pemerintahan koalisi-partai politik.
- Terdapat struktur organisasi negara nan-sehat, antara lain sistem demokrasi berbasis pemilu nan jujur dan adil. Terdapat struktur organisasi berisiko tidak sehat, misalnya pemerintahan otoriter.

VI. STRATEGI SUMBER-DAYA BANGSA

SDB terdiri dari kualitas SD Budaya, Kualitas Sistem Pemerintahan, kualitas/kuantitas SDA, kualitas SDM, SD Teknologi dan SD lain. Bangsa cerdas dan visioner memformulasikan tujuan bangsa, strategi terpilih menuju tujuan atau cita-cita bangsa, perumusan persyaratan sumber-daya utama bangsa, analisis sumber-daya dimiliki dan tidak dimiliki bangsa, strategi pembentukan dan pelestarian serta pembaharuan sumber-daya bangsa, dan strategi penggunaan sumber-daya bangsa menuju cita-cita berbangsa-bernegara.

SD buruk harus direformasi, bangsa yang tak memiliki SD tertentu dibutuhkan memperoleh dengan hampiran sewa, jenis kontrak lain, penjajahan ekonomi atau beli.

- Membuat daftar sumber-daya bangsa dalam berbagai rumpun atau sub-rumpun seperti budaya bangsa, iklim, luas daratan, nisbah daratan vs perairan, letak-strategis negara diantara bangsa bangsa lain, SDA asli bangsa dan taksiran deposit SDA, SDA konsesian/sewaan dari bangsa lain, tingkat teknologi dan akumulasi modal yang berkorelasi positif kepada daya-saing bangsa cq pertumbuhan ekonomi.
- Strategi pengelolaan/penggunaan SDA mencakupi

- Strategi pengelolaan/penggunaan SDA tidak-terpulihkan
 1. Strategi melepas ketergantungan APBN pada SDA tertentu.
 2. Strategi meningkatkan nilai-tambah SDA tak terpulihkan, misalnya proses refinasi hasil tambang dan membangun industri hilir terkait hasil-tambang.
 3. Strategi mencegah SDA terpulihkan turun-pangkat menjadi SDA Tidak-Terpulihkan misalnya mencegah munculnya lubang-ozon, kerusakan kualitas air-sungai, danau dan laut, kerusakan hutan-primer oleh manusia, hilangnya hutan-bakau sebagai RS-bersalin biota-laut.
 4. Strategi perpanjangan masa-guna SDA tak terpulihkan, misalnya Kabinet mengurangi target oil-lifting pertahun, Menteri Perindustrian melakukan optimalisasi penggunaan hasil-tambang tak terpulihkan dengan proses-refinasi dan industri hilir hasil-tambang, strategi substitusi yaitu akuisisi hak-eksplorasi tambang serupa LN juga dilakukan negara-negara kaya nirtambang. Sumber mata-air di NKRI sudah tinggal amat sedikit perlu perlindungan K/L Kehutanan dan K/L Lingkungan Hidup. Seluruh sumber-mata-air tersisa di NKRI harus menjadi hutan-lestari dengan polisi-hutan khuus.
 5. Strategi non-privatisasi dan selalu dimiliki negara untuk SDA strategis tertentu seperti sumber-air, pulau tidak boleh di jual, hutan-bakau, lahan-padi dilarang di konversi menjadi pemukiman, hutan-primer tak boleh di konversi menjadi hutan sekunder dan perkebunan, dan banyak lagi.
- Strategi pengelolaan/penggunaan SDA terpulihkan seperti udara, udara bergerak (angin), hujan, geothermal dan matahari.
- Strategi penciptaan SDA.
Negara kecil membeli batu dan pasir dari negara tetangga untuk memperluas daratn negara besar mengonversi tanah tandus dan negara gurun-pasir menjadi hutan & lahan pertanian dengan proyek reboisasi, proyek rehabilitasi dan teknologi-maju.
- Strategi pembangunan daya-saing bangsa/negara nir-SDA
 - i. DPR & Pemerintah menentukan garis-besar haluan perekonomian non-SDA.
 - ii. Berbagai negara/bangsa nir-SDA membangun industri berdaya-saing kelas dunia.
 - iii. Pembangunan daya-saing bangsa dapat berbasis pembangunan SDM berdaya saing.
 - iv. Pembangunan SDM bangsa sekaligus pengembangan industrialisasi dapat berbasis PMA (FDI) berkewajiban alih-teknologi.
 - v. Bangsa yang menghargai invensi & inovasi berarti sedang giat membangun daya-saing, korporasi mendapat subsidi riset & pengembangan, start up dan modal-ventura didorong dan dilindungi negara dengan berbagai instrumen.
 - vi. Tabungan di bank mendapat keringanan PPh.
 - vii. Bank di dorong untuk membuka fasilitas kredit-investasi sektor produktif.
 - viii. Pinjaman LN berbasis formulasi batas-aman kredit LN bagi bangsa, kabinet menetapkan batas sehat utang-negara.

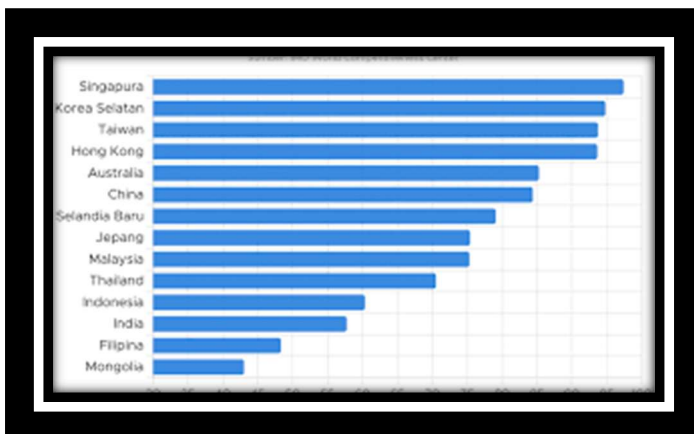
VII. PENGELOLAAN/PEMELIHARAAN SUMBER-DAYA BANGSA

- Pengelolaan sumber-daya bangsa bertujuan meningkatkan produktivitas bangsa cq pertumbuhan-ekonomi, penggunaan *endowment*, SDM dan teknologi harus tepat sasaran atau tepat-guna.
- UU Anti-Monopoli yang baik itu menyehatkan bangsa dan meningkatkan daya-saing bangsa. Persaingan antar pelaku-bisnis dalam-negeri nan-sehat akan meningkatkan efisiensi bangsa.

- Persaingan bidang apapun dengan negara-lain harus ditanggapi dengan peningkatan produktivitas *output/outcome* & efisiensi sumber-daya bangsa, bukan sikap/aksi permusuhan.
- Kabinet cinta-rakyat menggunakan tema: Kepentingan penduduk adalah utama, mereka harus dapat membeli kebutuhan hidup sehari-hari yang terbaik dengan harga termurah. Bila upaya melindungi industri DN & pasar DN dilakukan berlebihan, bangsa cq industri terproteksi berisiko buta-persaingan, tidak-efisien, manja-lemah dan makin tidak ber-daya-saing. Persaingan antar-bangsa merupakan “arena perkelahian” yang memperkuat “otot” bangsa. Bangsa yang belajar dari kekalahan-bersaing akan tumbuh makin-besar.
- Bila birokrasi bukan kleptokrasi, industri tertentu sengaja tidak diserahkan kepada perusahaan oleh swasta untuk rakyat karena berisiko oportunistis, kebijakan demi kepentingan rakyat. Sebagai misal, pada beberapa negara, industri realestate untuk rakyat dikelola K/L dan BUMN Realstate, bukan swasta, untuk perlindungan eskalasi harga-umum real-estate. SDA strategis seperti minyak/gas bumi dan sumber air-murni dikuasai negara.

VIII. PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DAYA-SAING BANGSA

- Kinerja kabinet yang berakhir diukur dengan kemajuan atau kemunduran daya-saing bangsa, karena itu setiap tahun APBN nan-baru Presiden menetapkan sasaran/target kenaikan daya-saing bangsa. LAKIP atau LKjPP bermuara pada peringkat daya-saing bangsa.
- Pemerintahan berkualitas tinggi adalah syarat utama pembangunan daya-saing bangsa, diperoleh dari sistem demokrasi cq pemilu berkualitas tinggi.
- Trias-politica adalah segala-galanya, konstitusi berkualitas universal nan-baik, falsafah-negara dan kualitas hukum-positif adalah syarat minimum pembangunan daya-saing bangsa. Perlindungan hak-milik warga cq perlindungan hak-milik properti adalah syarat sistem perekonomian pasar-bebas nan-sehat. Daya-saing bangsa hancur tatkala pemerintahan otoriter cq pemerintahan diktator/sosialis/komunis ekstrem secara semena-mena melanggar azas ini.
- Sejarah mencatat bahwa terdapat berbagai pimpinan negara yang (tak sadar atau tak sengaja ?) menghancurkan daya-saing bangsanya.
- Sejarah mencatat bahwa terdapat berbagai pemerintahan mencoba membangun daya-saing bangsa dan gagal karena basis budaya-asli nan-buruk cq malas dan jahat.



- Daya-saing bangsa berbasis sistem pasar-bebas hanya dapat dibangun oleh birokrasi bebas-korupsi nan demokratis, terfokus pada pemeliharaan/perlindungan pasar-bebas, pasar-uang & pasar-modal, pembangunan/pemeliharaan lembaga keuangan cq sistem perbankan nan-sehat tak mungkin dilakukan pemerintahan otoriter.

- SARA dan budaya-kebencian / permusuhan amat-segera menyebabkan pembusukan bangsa dari-dalam sehingga

menghancurkan daya-saing bangsa, ditandai pertumbuhan PDB negatif.

- Kabinet cq K/L cq Hankam membangun sistem kendali-internal perlindungan/pelestarian daya-saing bangsa.
- Konflik internal/eksternal apalagi perang antar-negara tentu saja menggerogoti APBN dan menghapus fokus/ peluang membangun daya-saing bangsa.
- Pemerintah bertugas mengelola ekonomi-makro berbasis kebijakan-fiskal (APBN) cq besar utang dan kebijakan-moneter cq uang-beredar cq kekuatan mata-uang domestik cq nilai-tukar & inflasi, menjaga mekanisme pasar-bebas berjalan lancar & baik.
- Pemerintah melaksanakan program industrialisasi bahkan akselerasi industrialisasi berbasis cetak-biru industrialisasi & perdagangan tersepakati di DPR. Pemerintah membuat /merangkai APBN prasarana industrialisasi & perdagangan umumnya, khususnya mendorong industrialisasi berbasis ekspor & substitusi-impor bagi UB dan UMKM.
- Pemerintah bertugas membuka jalan dan memandu bangsa menuju pasar-bebas global.

IX. STUDI KASUS JEPANG PASKA KALAH-PERANG

Jepang menyerah 1945, pendudukan Amerika atas Jepang berakhir tahun 1950 an, Jepang merdeka tahun 1952, dan sebagian (besar?) pengamat meragukan peluang Jepang bangkit kembali, karena negara-miskin yang tak memiliki SDA dan lahan-pertanian nan-memadai. Kekalahan perang Jepang ternyata menimbulkan duka-mendalam dalam hati sisa penduduk paska-perang, dan duka tersebut lalu bertransformasi menjadi berupa tekad-nasional untuk melakukan perang-ekonomi, karena perang fisik tak-mungkin dilakukan. Sebagai negara nir- endowmen, sejarah mencatat pertumbuhan ekonomi Jepang periode 1954-1971 mencapai rerata 10.1 % pertahun, PDB perkapita mengejar AS tahun 1989. Sesungguhnya, modal-dasar bangsa dibentuk sekitar 100 tahun sebelumnya, pada tahun 1868, yang mengakhiri episode-gelap nan-panjang politik tutup-pintu, dimana Restorasi versi Dinasti Meiji menyebabkan politik buka-pintu Jepang untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara maju Barat, menyerap ilmu-pengetahuan & teknologi asing cq Barat, lalu secara amat cepat membangun pelabuhan, jalan raya dan jalan KA, telepon dan telegraf. KPBU sektor privat & pemerintah bekerja-sama pada dekade selanjutnya untuk membangun industri besi-baja, kapal, senjata, lalu pembangunan industri kimia, kendaraan dan pesawat-udara sebagian besar milik privat.

Budaya Jepang berhakikat Konfusianisme adalah sebuah budaya-keluarga, dimana setiap orang terpanggil bekerja-keras, belajar, menabung dan berinvestasi untuk anak-cucunya, sebuah budaya yang mencipta lahan-perang nan-baru, yaitu perang-ekonomi, menjadi sistem-ekonomi hak-milik pribadi atau kapitalisme. Dalam faham konfusianis, guru adalah pendidik mewakili ortu, sehingga perlu diberi imbalan memadai, menyebabkan kualitas sekolah Jepang menjadi tulang-punggung kekuatan-bangsa. Tak heran bila remunerasi guru dan kualitas SLTP/SLTA tergolong terbaik di dunia, kurang-lebih setara gaji manajer senior perusahaan komersial. Guru adalah individu istimewa bangsa karena kemampuan mendidik nan-istimewa. Rahasia sukses yang lain, lembaga kepemerintahan merekrut SDM hanya berupa lulusan terbaik. Faham konfusianisme amat menghargai senioritas (dimana umur identik pengalaman cq pengetahuan terpadu kearifan hormonal) apapun dalam kepemerintahan dan sektor swasta. Kebebasan/kemerdekaan adalah segalanya, sehingga negara memilih sistem parlementer terdominasi Partai Demokrat Liberal. 70 % perekonomian di dominasi sektor privat.

Sejarah tersebut di atas lalu mengalami perubahan, pada tahun 2024, secara keseluruhan: Jepang berada di peringkat ke-38 menurut CNBC Indonesia, di bawah Indonesia yang berada di peringkat 27. Pengembangan bakat manusia: Peringkatnya adalah ke-36, dengan kelemahan pada investasi pendidikan, jumlah guru, dan keterampilan bahasa. Daya saing industri manufaktur: Jepang berada di peringkat ke-4, dengan nilai daya saing industri manufaktur sebesar 0,3, di bawah Amerika Serikat (0,32), Taiwan (0,31), dan Swiss (0,31) menurut Databoks Katadata. PDB per Kapita Jepang (Nominal): US\$37.175, PDB per Kapita (PPP): US\$46.178 7.145, jauh di bawah AS, berada di peringkat yang lebih tinggi dari PDB per kapita (PPP) global, seperti yang dilaporkan oleh Trading Economics dan CNN Indonesia.

Daya saing Jepang menurun akibat kombinasi masalah demografis seperti populasi menua dan menyusut, stagnasi ekonomi yang ditandai dengan gaji rendah dan konsumsi yang lesu, serta tantangan struktural seperti utang nasional yang tinggi dan penurunan produktivitas. Selain itu, kemajuan pesat negara lain dalam industri seperti mobil listrik juga menantang dominasi industri tradisional Jepang.

Faktor utama penyebab penurunan daya saing Jepang:

- Demografi yang menua dan menyusut:
 - Angka kelahiran yang rendah dan populasi lansia yang terus membengkak mengurangi jumlah tenaga kerja produktif.
 - Hal ini menciptakan kekhawatiran akan keberlanjutan sistem jaminan sosial dan produktivitas nasional secara keseluruhan.
- Stagnasi ekonomi:
 - Upah yang tidak kunjung naik sejak lama membuat daya beli masyarakat menurun, sehingga konsumsi rumah tangga menjadi lesu.
 - Stagnasi ini diperparah oleh "dekade yang hilang" di tahun 1990-an akibat runtuhnya gelembung aset, yang menyebabkan kredit macet dan kepercayaan konsumen anjlok.
- Tantangan struktural:
 - Utang nasional yang sangat tinggi membebani perekonomian.
 - Produktivitas dan daya saing menurun karena kurangnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan adaptasi terhadap perubahan industri global seperti revolusi digital dan manufaktur tanpa pabrik.
 - Beberapa sektor seperti industri bioteknologi juga mengalami penurunan daya saing akibat kebijakan harga obat yang ketat dan minimnya investasi dalam penelitian dan pengembangan.
- Perubahan lanskap industri global:
 - Munculnya kendaraan listrik (EV) menggoyahkan dominasi Jepang di sektor otomotif global, yang sebelumnya sangat kuat.
 - Pelemahan mata uang yen juga memengaruhi daya saing Jepang di pasar global.

X. DETERMINAN DAYA SAING BANGSA

Inilah inti makalah. Studi Ferraz, Kupfer and Haguener (1996) menyatakan bahwa daya-saing bangsa adalah kapasitas / kemampuan suatu bangsa untuk memformulasikan dan menerapkan strategi terpilih untuk mencapai tujuan/sasaran nasional bangsa tersebut.

Daya-saing bangsa berkelanjutan berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Sebuah negara dianggap ber-daya-saing apabila mampu memformulasi/merencanakan penggunaan segala sumber-daya untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup bangsa. Masyarakat Uni-Eropa menyatakan bahwa daya-saing regional Uni-Eropa adalah kapasitas wilayah itu untuk mencapai taraf -hidup dan tingkat-pemerkerjaan (*employment*) tertentu dalam bingkai-waktu jangka-panjang.

Berbagai hampiran teoretis tentang daya-saing terkait pertumbuhan-ekonomi mencakupi investasi modal, klasifikasi tenaga-kerja dan perdagangan, (1) dalam teori ekonomi-klasik mencakupi tingkat kepadatan-modal (intensitas modal), investasi, kebijakan subsidi pemerintah, kebijakan pajak, (2) pada tataran Keynesian, mencakupi pula perubahan struktural, perdagangan-bebas dan investasi- asing-langsung (FDI), (3) dari sudut pandang teori ekonomi pembangunan, mencakupi pula tingkat-edukasi bangsa, Belanja APBN bagi SDM produktif, Belanja APBN untuk Riset & Pengembangan, penghargaan negara pada inovasi terkait Teori Pertumbuhan Baru ("*new growth theory*"). Selaras dengan konsep di atas, (4) para pakar Teori Endogenous menyoroti aspek modal SDM (*human capital*) (Lucas, 1988), (5) aspek inovasi (Romer, 1990; Aghion and Howitt, 1992), (6) aspek infrastruktur (Barro, 1990), (7) aspek kualitas kelembagaan (Romer, 1986), (8) aspek persaingan dan perdagangan-bebas (Grossman and Helpman, 1991). (9) Ferraz, Kupfer and Haguenaer (1996) mengembangkan hampiran dinamis untuk daya-saing bangsa, dengan batasan/constraint : suatu jenis bisnis, faktor struktural dan faktor sistemik nandinamis, menengarai variabel daya-saing nan-relevan untuk tiap tingkat sistem dan interaksi antar-sistem, sehingga di simpulkan baha daya-saing bangsa bersifat sistemik (Esser and others, 1996). (10) Walau pustaka tak seberapa ekstensif, terhipotesakan hubungan positif antara daya-saing dengan pertumbuhan-ekonomi pada riset Kordalska & Olczyk (2016). (11) Menggunakan metode analisis data terbungkus/terkurung (*envelopment analysis (DEA)*), tingkat daya-saing diukur dengan berbagai determinan berbasis analisis-komparatif antar-negara (Rocha, Rebelatto & Camiato, 2015; Ülengin & others, 2011; Charles & Zegarra, 2014) berbasis konsepsi *ex ante* terfokus pada efisiensi alokasi SD dan APBN.

Temuan utama menyimpulkan bahwa faktor edukasi, geografi, kualitas pendapatan nasional, kelembagaan nan sehat dan tatakelola barang-publik adalah determinan efisiensi-bangsa untuk menjadi lebih berdaya-saing.

Metodologi DEA digunakan untuk pengukuran efisiensi negara berbasis agregat fungsi produksi sebagai proksi daya-saing komparatif suatu bangsa, ditambah (1) metode dekomposisi faktor-produksi keseluruhan (*total factor productivity (TFP)*) menjadi berbagai faktor teknis dalam khasanah *Indeks Malmquist*, (2) model ekonometrik untuk pengukuran determinan/faktor daya-saing yang kemudian digunakan untuk membentuk berbagai kebijakan-pemerintah dalam meningkatkan daya-saing dan pertumbuhan PDB negara sambil mengendalikan mulikolinearitas antar faktor-faktor tersebut.

Pada hampiran *ex-post* (*ex-post approach*), pertumbuhan daya-saing terkait pada penerimaan hasil ekspor industrial, dimana daya saing negara meningkat apabila dominasi produk/jasa tertentu pada pasar-internasional meningkat (Haguenaer, 1989) secara-langsung atau tidak-langsung yang dipengaruhi kebijakan & fakta nilai-tukar, kebijakan-perdagangan, efisiensi saluran-pemasaran, sistem pembiayaan,

Fungsi produksi agregat sbb.

$$Y = AK \alpha L^{1-\alpha} \quad (1)$$

Dimana :

- Y adalah output atau hasil
- K adalah tingkat modal bangsa
- L adalah jumlah pekerja
- A adalah parameter-positif, antara 0 dan 1, menyajikan pulangan modal.
- Makin besar Y makin tinggi produktivitas bangsa, karena peningkatan efisiensi penggunaan input modal dan TK pada teknologi yang sama.
- Makin besar kandungan-teknologi tepat-guna yang ada, makin besar nilai ekspor, makin besar produktivitas bangsa.
- Makin tinggi rerata pendidikan cq kualitas TK formal, makin tinggi produktivitas.

Pada hampiran dinamis (Ferraz, Kupfer and Haguenaer (1996)), kualitas proses pembentukan daya-saing bangsa oleh kabinet adalah (1) formulasi kebijakan-pemerintahan nan-tepat berbasis hampiran patok-duga praktik-praktik terbaik dunia untuk meningkatkan kualitas faktor-faktor pembentuk daya-saing bangsa dan (2) kualitas implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, terutama pada organisasi-organisasi produksi para-eksportir, organisasi pemasok eksportir (misalnya pabrik suku-cadang atau bahan-baku) dan kualitas organisasi-organisasi pendidikan-formal & organisasi-organisasi ketenagakerjaan, yang bermuara pada pertumbuhan-stabil ekspor jangka-panjang & peningkatan dominasi-pasar global (*global market-share*) karena strategi akumulasi kapasitas-produktif nan-stabil lintas-waktu, secara dinamis selalu tersesuai (beradaptasi dengan) perubahan kondisi/teknologi perekonomian-dunia cq perubahan pola/kondisi perekonomian & teknologi negara tujuan ekspor.

Kualitas organisasi eksportir berpengaruh langsung pada daya-saing bangsa antara lain

- Kualitas kewirausahaan eksportir
- Gunggungan pengalaman & pengetahuan eksportir nasional.
- Kualitas cq efektivitas manajemen eksportir nasional.
- Budaya manajemen eksportir nasional.
- Kualitas manajemen SDM eksportir cq manajemen budaya, manajemen pelatihan berorientasi pada teknologi, manajemen SDM cq evaluasi kerja dan kebijakan imbalan SDM, inovasi produk / jasa utama eksportir, metode/sistem tata-cara kerja organisasi-eksportir.

Faktor struktural organisasi-eksportir adalah kumpulan faktor yang tak dapat dikendalikan sebagian/sepenuhnya oleh organisasi eksportir seperti rezim yang sedang berkuasa, distribusi geografis dan tingkat kemajuan teknologi bangsa, prasarana ekspor, pertumbuhan PDB, dan kualitas kebijakan & sistem pemasaran bangsa oleh kabinet untuk penetrasi ke pasar-global.

Terdapat berbagai faktor sistemis (*systemic factors*) yang praktis tak-terkendali oleh para-eksportir antara lain kualitas infrastruktur bangsa dan struktur industri bangsa, budaya bangsa, kualitas transportasi bangsa, biaya energi, kualitas telekomunikasi bangsa, kemudahan input dan layanan telekomunikasi entitas-eksportir.

Terdapat berbagai kondisi ekonomi-makro penunjang/penghalang kinerja-ekspor bangsa seperti kekuatan mata-uang, pajak ekspor/impor & pajak khusus bagi eksportir/importir, pertumbuhan PDB domestik, sumber dana kredit & suku-bunga khusus bagi eksportir,

kebijakan ketenaga-kerjaan dan UMR khusus bagi entitas-eksportir, dayabeli APBN, dukungan-fiskal APBN untuk pengambilan risiko-teknologi industri berorientasi ekspor, hukum-positif pelatihan TK Formal bagi entitas-eksportir, tunjangan-sosial, undang-undang kepemilikan properti, undang-undang lingkungan-hidup, kondisi dan tren kosumen pasar-global, perlindungan investasi berisiko-tinggi dan hak-cipta, serta hukum positif organisasi multilateral. (Sumber: *World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013–2014, Geneva, 2014*).

XI. BERBAGAI ANALISIS DAYA-SAING BANGSA

1. Determinan Kualitas konstitusi & demokrasi bangsa

Kualitas konstitusi (Undang-Undang Dasar) memiliki korelasi yang kuat dan fundamental terhadap daya saing suatu bangsa. Konstitusi yang berkualitas menyediakan landasan hukum, stabilitas, dan kerangka kelembagaan yang esensial untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing global.

Berikut adalah aspek-aspek kunci terkait:

1.1. Menciptakan Stabilitas dan Kepastian Hukum

- Hukum Tertinggi: UUD dan falsafah negara berkedudukan sebagai hukum tertinggi yang menjadi pedoman bagi semua peraturan di bawahnya, sehingga menciptakan tatanan hukum yang hierarkis dan konsisten, berlegitimasi global.
- Kepercayaan Investor: Adanya kepastian hukum yang termaktub dalam konstitusi yang stabil akan meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, yang pada gilirannya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas ini penting untuk mencegah intervensi politis yang semena-mena.

1.2. Menjamin Hak dan Kesejahteraan Rakyat

- Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Konstitusi yang menjamin HAM dan keadilan sosial (seperti UUD 1945) menciptakan lingkungan masyarakat yang adil dan setara, yang penting untuk memelihara kohesi-sosial dan pembangunan berkelanjutan.
- Prinsip Ekonomi Inklusif Kerakyatan: UUD 1945 menetapkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan nasional yang bertujuan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, yang membantu mengurangi senjang kaya-miskin dan memperkuat fondasi ekonomi bangsa.

1.3. Kerangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

- Pembatasan Kekuasaan eksekutif: DPR dan konstitusi mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan organ negara, batas masa-kabinet, mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Independensi Lembaga: Konstitusi yang kuat menjamin independensi lembaga-lembaga penting negara seperti DPR/D, bank sentral dan badan peradilan, memastikan keputusan dibuat berdasarkan hukum positif daripada hampiran politis.

Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa reformasi kebijakan yang berakar pada kerangka hukum yang kuat dapat meningkatkan daya saing. Misalnya, Undang-Undang

Cipta Kerja disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama yang mendorong peringkat daya saing Indonesia dalam *IMD World Competitiveness Ranking*.

Secara ringkas, konstitusi yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara efektif memberikan fondasi stabilitas, keadilan, dan tata kelola yang diperlukan agar suatu negara, sebagai cara paling baik mengoptimalkan SDM, menarik investasi, dan pada akhirnya, meningkatkan daya saing bangsa.

Perlu diungkapkan bahwa hubungan antara kualitas demokrasi dan daya saing bangsa adalah kompleks dan tidak selalu langsung, dengan berbagai hasil penelitian yang beragam menunjukkan adanya potensi sinergi positif keduanya, sbb :

Pertama, Sinergi Potensial (Pengaruh Positif)

Kualitas demokrasi nan tinggi dapat meningkatkan daya saing bangsa melalui beberapa mekanisme:

- Pemilu nan-jurdil mencipta *trias-politica* lembaga negara nan-superior, terutama DPR dan Kabinet.
- Akuntabilitas dan Transparansi: Sistem demokrasi membuka ruang adanya koreksi dan pengawasan publik terhadap pemerintah, yang dapat menghalangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan-negara cq anggaran serta kebijakan ekonomi.



- Stabilitas Kebijakan: Meskipun proses perumusan kebijakan di negara berdemokrasi mungkin relatif lebih lambat dibanding sistem-diktator karena melibatkan banyak pemangku kepentingan, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih berkualitas, stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang karena adanya partisipasi publik dan dukungan yang lebih luas.

- Pembangunan SDM nan-produktif: Demokrasi secara konsisten menghasilkan peningkatan hasil di bidang kesehatan dan pendidikan, yang merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas bangsa.

- Penyelesaian Konflik secara Damai: Demokrasi menyediakan mekanisme hukum untuk penyelesaian konflik (bila ada) secara damai, iklim demokrasi nir-SARA menciptakan lingkungan sosial dan politik yang lebih stabil dan kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, Tantangan dan Senjang (Pengaruh Negatif/Netral)

Di sisi lain, beberapa penelitian dan pengamatan juga menyoroti potensi tantangan:

- Biaya Demokrasi Tinggi: Proses demokrasi, seperti pemilu yang mahal dan penyelenggaraan segala hal secara demokratis, dapat menimbulkan biaya ekonomi yang signifikan dan berpotensi menguras sumber daya bangsa.
- Senjang Kinerja: Terdapat senjang antara tingginya skor Indeks Demokrasi di beberapa daerah (misalnya, Jawa Barat) dengan performa daya saingnya yang masih tertinggal, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas sistem dalam mendorong kinerja pembangunan daerah.

- Ketidakpastian dan Polarisasi: Tantangan demokrasi seperti konflik berbasis SARA dan polarisasi kelompok/unsur non-demokratis dapat menciptakan ketidakpastian politik yang berpotensi menghambat investasi asing langsung dan perdagangan internasional, bila tak dideteksi & diredam pemerintah..
- Hasil Empiris yang Beragam: Beberapa analisis empiris menunjukkan bahwa variabel demokrasi mungkin *tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap perdagangan internasional atau pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek di beberapa negara*.

Secara ringkas, demokrasi yang berfungsi dengan baik, dengan institusi yang kuat dan transparan, cenderung menciptakan fondasi yang kokoh untuk daya saing bangsa dalam bingkai-waktu jangka panjang. Namun, demokrasi yang hanya berjalan secara prosedural tanpa diiringi oleh penguatan kapasitas-kelembagaan / institusional dan tata kelola nirkorupsi yang baik, tak seberapa meningkatkan daya saing bangsa.

2. **Determinan Model ekonomi liberal, klasifikasi perdagangan, perdagangan-bebas dan iklim persaingan-domestik**

Makin liberal demokratis bangsa, makin mudah menuju kemakmuran. Demokratis artinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ditandai pemilu jurdil. Sebaliknya adalah pemerintahan otoriter diktator kleptokratis.

Berbagai jenis pemodelan ekonomi bangsa dapat dikategorikan berdasarkan sistem ekonomi tradisional, komando, pasar, dan campuran) atau berdasarkan metodologi teoretis dan empiris. Selain itu, ada juga model ekonomi spesifik seperti model ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi sirkular, model ekonomi tertutup/terbuka, serta model-model ekonomi makro seperti Keynesian dan moneterisme.

Pertama, Model ekonomi berdasar Sistem Ekonomi

- Ekonomi Tradisional: Berkembang berdasarkan kebiasaan, tradisi, dan kepercayaan turun-temurun, di mana produksi dan distribusi mengikuti pola yang sudah ada.
- Ekonomi Komando: Pemerintah totaliter mengendalikan semua aspek ekonomi, termasuk kepemilikan sumber daya dan keputusan produksi.
- Ekonomi Pasar: Keputusan ekonomi ditentukan oleh kekuatan pasar (penawaran dan permintaan) dan individu, dengan peran pemerintah yang minimal, terpaksa melakukan intervensi bila mekanisme-pasar-bebas tak berfungsi baik.
- Ekonomi Campuran: Menggabungkan elemen dari ekonomi pasar dan komando, di mana pasar tetap menjadi penggerak utama, tetapi pemerintah melakukan intervensi dan regulasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai misal, pemerintah melakukan pemberdayaan UMKM, membangun BUMN untuk tugas khusus bagi bangsa.

Kedua, Model ekonomi berdasar berdasar Metodologi

- Model Teoretis: Berupaya menjelaskan perilaku ekonomi dengan asumsi dan kaidah tertentu untuk mendapatkan dampak/implikasi yang dapat diverifikasi.
- Model Empiris: Menggunakan data historis dan statistik untuk menguji dan memprediksi tren ekonomi.

Ketiga, Model ekonomi berdasar berdasar Pendekatan dan Contoh Spesifik

- Model Ekonomi Hijau, Biru, dan Sirkular: Model-model modern yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan-hidup dan kesejahteraan sosial, berbeda dengan model ekonomi konvensional.
- Model Tertutup dan Terbuka: Model sederhana yang mengilustrasikan interaksi antara sektor ekonomi rumah tangga, produsen, dan pemerintah (tertutup) atau juga melibatkan sektor luar negeri (terbuka).
- Model Keynesian: Mengajukan intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal (pajak dan pengeluaran) untuk menstabilkan/mendorong laju perekonomian.
- Model Monetarisme: Berfokus pada pengendalian jumlah uang untuk menjaga stabilitas ekonomi, dengan argumen bahwa intervensi pemerintah yang berlebihan dapat menciptakan ketidakstabilan.

Sejarah mencatat bahwa tidak ada satu pun "model ekonomi" tunggal secara universal dianggap paling berhasil secara empiris untuk banyak negara di muka-bumi, karena keberhasilan sangat bergantung pada konteks spesifik bangsa itu, waktu, dan tujuan kebijakan. Sebagai misal, bangsa berwatak kleptokrasi, penipu, pembohong, penjahat dan pengecut tak mungkin ber-demokrasi cq ber-pemilu jurdil.

Model-model yang berbeda dapat digunakan sebuah negara untuk menganalisis berbagai aspek perekonomian, dan keberhasilan empiris sering kali berarti kemampuan model untuk menjelaskan fenomena atau memprediksi hasil kebijakan tertentu.

3. Pilihan Model Perekonomian Bangsa.

Secara umum, beberapa jenis pemodelan yang telah terbukti berguna secara empiris meliputi:

- Model Pertumbuhan Neoklasik (Model Solow-Swan): Model ini, yang dikembangkan oleh Robert Solow, sangat berpengaruh dan banyak digunakan sebagai kerangka-kerja dasar untuk memahami pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Secara empiris, model ini memprediksi bahwa negara-negara dengan kebijakan yang lebih baik akan menjadi lebih kaya dan negara-negara yang jauh dari tingkat pendapatan memadai (steady-state) akan tumbuh lebih cepat, yang didukung oleh beberapa bukti lintas negara.
- Model Ekuilibrium Umum Terhitung (Computable General Equilibrium - CGE): Model CGE adalah model simulasi terperinci yang dirancang untuk menangkap/mengakomodasi sub-bagian-ekonomi dan karakteristik-spesifik ekonomi suatu negara. Model-model ini digunakan oleh PBB cq Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan lembaga pemerintah tertentu untuk mensimulasikan dampak berbagai guncangan hipotetikal dan intervensi kebijakan (misalnya, pajak, tarif, perubahan iklim) terhadap seluruh sistem ekonomi dan hampiran ini telah terbukti berguna dalam analisis kebijakan.
- Model Gravitasi Perdagangan (*Gravity Model of Trade*): Model ini, yang pada dasarnya memperkirakan aliran perdagangan antara dua negara berdasarkan ukuran ekonomi mereka (PDB) dan jarak di antara mereka, sangat berhasil secara empiris dalam memprediksi pola perdagangan internasional.
- Model Input-Output (*I-O Model*): Model ini membantu dalam menganalisis keterkaitan antarsektor dalam perekonomian dan mengukur dampak ekonomi dari suatu peristiwa atau kebijakan tertentu (misalnya, dampak investasi infrastruktur baru terhadap pertumbuhan industri terkait).

Teori model ekonomi amat dinamis sehingga selalu mengalami penyempurnaan. Penting untuk dicatat birokrasi bahwa para ekonom terus-menerus menilai dan memodifikasi model yang ada berdasarkan bukti empiris baru. Perlu diingatkan bahwa tidak ada model yang sempurna, dan semuanya adalah penyederhanaan realitas yang subjektif ke dalam sebuah model.

Model ekonomi terpilih oleh suatu negara *berkorelasi kuat dan fundamental terhadap daya saing* bangsanya. Model ekonomi menentukan kerangka kerja, kebijakan, dan insentif yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas, inovasi, dan efisiensi cq kedudukan suatu negara di pasar global.

Korelasi ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama sbb:

Pertama, Produktivitas sebagai Inti Daya Saing

Menurut Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum/WEF*), daya saing global didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memberikan tingkat kemakmuran yang tinggi kepada warganya, yang bergantung pada seberapa produktif negara tersebut memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Model ekonomi yang berbeda menciptakan lingkungan yang berbeda pula untuk mendorong produktivitas.

Kedua, Peran Mekanisme Pasar dan Intervensi Pemerintah.

- Model Ekonomi Pasar (*Laissez-faire*): Model ini menekankan pada mekanisme pasar bebas (persaingan sempurna) dan peran pemerintah yang minimal.
 - Dampak Positif: Model ekonomi pasar mendorong efisiensi, inovasi, dan alokasi sumber daya yang optimal karena perusahaan didorong untuk bersaing dan berinovasi untuk bertahan (*survival*).
 - Dampak Negatif / Tantangan: Model ekonomi pasar dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan atau kegagalan pasar dalam penyediaan barang-publik tertentu (misalnya, infrastruktur dasar atau pendidikan) yang justru penting untuk daya saing bangsa dalam jangka panjang.
- Model Ekonomi Terencana/Terpusat: Model ini melibatkan kontrol pemerintah yang signifikan terhadap produksi dan alokasi sumber daya.
 - Dampak: Model ekonomi berbasis rencana kabinet cenderung kurang efisien dan kurang inovatif dibandingkan model pasar karena kurangnya insentif berbasis keuntungan dan persaingan.

Ketiga, Faktor-faktor Penentu dalam Model Ekonomi

Model ekonomi yang efektif dalam meningkatkan daya saing bangsa, pada umumnya akan berfokus pada pilar-pilar berikut:

- Inovasi dan Teknologi: Model yang mendukung penelitian dan pengembangan (litbang dan hak-paten), serta penerapan teknologi dalam kegiatan produktif bangsa, akan meningkatkan daya saing bangsa secara signifikan.
- Sumber Daya Manusia (SDM): Model ekonomi yang mengutamakan kualitas SDM bangsa yang kurang SDA cq investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan keahlian tenaga kerja (kewirausahaan) merupakan faktor krusial yang dipengaruhi oleh kebijakan dalam model ekonomi.
- Infrastruktur: Model ekonomi yang berfokus pada kualitas infrastruktur fisik dan digital sangat penting untuk mendukung logistik dan konektivitas, yang merupakan bagian dari kebijakan belanja pemerintah cq misalnya bagi sebuah negara seluas Eropa. dalam model ekonomi tertentu.

- Stabilitas Ekonomi Makro: Model ekonomi berbasis kebijakan moneter dan fiskal yang stabil (mengontrol inflasi, suku bunga, dan utang) menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi domestik dan asing, sebagai model paling populer.
- Efisiensi Birokrasi dan Hukum: Model ekonomi negara miskin atau berkembang yang percaya bahwa model ekonomi yang efektif harus ditopang oleh birokrasi non-efektif/efisien dan penegakan hukum yang pasti, untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi.

Secara ringkas, model ekonomi menyediakan fondasi struktural yang menentukan apakah suatu bangsa dapat bersaing secara efektif di arena global, terutama melalui kemampuan untuk mendorong produktivitas bangsa dan inovasi berkelanjutan. Tiap bangsa boleh memilih model ekonomi, melakukan patok-duga kepada negara-negara dan/atau mencipta model-ekonomi sendiri sesuai ciri khas bangsa.

Klasifikasi perdagangan & industri sangat erat berkaitan dengan daya saing suatu bangsa, di mana *struktur industri yang kuat dan berbasis kebijakan industrialisasi nan-tepat sehingga berdampak-multiplier, merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa di pasar global*. Klasifikasi industri & perdagangan membantu negara untuk memilih spesialisasi dan meraih keunggulan komparatif.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai korelasi tersebut:

1. Keunggulan Komparatif (dibanding bansa lain) dan Spesialisasi.

Klasifikasi industri memungkinkan suatu negara untuk mengidentifikasi sektor-sektor di mana negara tersebut memiliki *keunggulan komparatif* atau relatif terhadap bangsa-bangsa lain, misalnya kemampuan memproduksi barang dengan konsepsi biaya peluang (*opportunity cost*) yang lebih rendah).

- Negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah cenderung berspesialisasi pada industri berbasis SDA, yang meningkatkan kinerja ekspor dan daya-saing pada komoditas tertentu.
- Perdagangan internasional mendorong spesialisasi bangsa, memungkinkan negara untuk terfokus pada produksi yang paling efisien pada tataran pasar global.

2. Peningkatan Nilai Tambah Melalui Industrialisasi

Transformasi ekstraksi / perdagangan bahan-mentah menuju industri/perdagangan produk-industri olahan sangat penting.

- Ekspor bahan mentah semata tidak memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian bangsa, nilai tambah di cipta oleh proses produksi bahan baku menjadi barang-jadi atau komponen barang-jadi.
- Sektor perdagangan cq kemampuan memasarkan berbasis pada kemajuan-industrialisasi memegang peranan-penting peningkatan daya-saing bangsa.

3. Struktur Industri dan Inovasi

Struktur industri suatu negara sangat memengaruhi daya saingnya secara keseluruhan.

- Terdapat jenis negara dagang, negara jasa, negara ekstraksi, negara industri atau campuran dari keempatnya. Negara dengan industri manufaktur nan-kuat & terintegrasi dari hulu ke hilir, meningkatkan daya-saing bangsa.
- Investasi dalam modernisasi teknologi, penguatan citra dan identitas merek, dan pelatihan keterampilan TK mendorong industri naik kelas dari basis

produksi/jasa bernilai-tambah tertentu ke segmen produk/jasa bernilai tambah lebih tinggi.

- Inovasi dalam industri juga terkait erat dengan daya saing bangsa, dengan kemudahan berbisnis juga memainkan peran penting dalam hubungan ini. Bangsa berdaya-saing memberi imbalan layak bagi invensi dan inovasi anak-bangsanya.

4. Pengukuran Daya Saing Bangsa

Daya saing industri dan perdagangan sering diukur menggunakan berbagai instrumen analisis, seperti:

- *Revealed Comparative Advantage (RCA)*: Nilai RCA di atas satu menunjukkan suatu komoditas memiliki keunggulan komparatif di atas rata-rata dunia, mengindikasikan daya saing yang kuat.
- Analisis LQ (*Location Quotient*) dan *Shift Share*: Digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan daya saingnya dalam struktur ekonomi suatu wilayah atau negara.

Disimpulkan, pilihan klasifikasi bentuk perekonomian bangsa dan pilihan bentuk struktur industri yang tepat, didukung oleh kebijakan strategis pemerintah, sangat penting dalam menentukan posisi dan daya saing suatu bangsa.

Korelasi antara sistem perdagangan bebas dan daya saing bangsa bersifat *kompleks dan saling terkait*, perdagangan bebas dapat *meningkatkan daya saing* dengan mendorong efisiensi dan inovasi, namun juga dapat pula berdampak *menurunkan daya saing* industri domestik tertentu bilabangsa tidak siap menghadapi persaingan global.

Faktor pencipta dampak Positif terhadap Daya Saing:

- *Peningkatan Kualitas Produk/Jasa*: Persaingan di pasar global memaksa produsen-domestik untuk meningkatkan kualitas-produk/jasa mereka agar dapat bersaing, yang secara total dengan cara menaikkan standar-mutu barang dan jasa di pasar.
- Efisiensi dan Inovasi: Untuk bertahan dalam persaingan, perusahaan didorong untuk lebih efisien dalam produksi dan berinovasi.
- Spesialisasi (Teori Keunggulan Komparatif): Negara dapat fokus memproduksi barang atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu barang yang dapat diproduksi dengan biaya peluang (*opportunity cost*) lebih rendah dibandingkan negara lain. Spesialisasi memungkinkan produksi yang lebih besar dan lebih efisien, mencapai skala keekonomian optimal.
- Akses Pasar yang Lebih Luas: Perdagangan bebas membuka kemungkinan masuk pasar ekspor nan-baru.
- Transfer Teknologi dan Pengetahuan: Keterbukaan karena sistem-perdagangan bebas memfasilitasi masuknya teknologi baru, praktik bisnis terkini & terbaik, dan masuknya investasi asing, yang dapat meningkatkan kapasitas produksi bangsa dan daya saing bangsa.

5. Dampak Negatif Kebijakan Impor terhadap Daya Saing.

- *Ancaman bagi Industri Domestik*: Industri domestik tradisional, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM) atau sektor dengan biaya produksi tinggi, mungkin menghadapi kesulitan bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan lebih berkualitas.

- Penurunan Penjualan Produk Lokal: Masuknya produk asing (impor) secara bebas dapat menggerus pangsa pasar produk lokal, yang berpotensi menyebabkan kerugian, penurunan dan penutupan aktivitas ekonomi domestik.
- Ketergantungan: Bangsa/negara berisiko menjadi terlalu bergantung pada impor untuk barang/jasa impor tertentu, mengancam stabilitas ekonomi jika terjadi gangguan pada rantai pasokan global.
- Kesenjangan Ekonomi: Distribusi manfaat perdagangan bebas lintas-bangsa mungkin tidak merata, dapat menguntungkan sektor-sektor kuat & berdayasaing global atau merugikan sektor yang lemah daya-saing, dapat memperdalam /memperlebar senjang ekonomi.

Disimpulkan bahwa sistem perdagangan-global nan- bebas berfungsi sebagai *katalisator* yang memaksa tiap-bangsa untuk memelihara/meningkatkan daya saingnya, bukan sebaliknya.

6. Budaya dan Watak Bangsa.

Watak bangsa nan-adaptif lingkungan-eksternal merupakan modal keberlanjutan, bangsa tidak adaptif-lingkungan-eksternal akan musnah. Keberhasilan suatu bangsa dalam era perdagangan bebas sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan keunggulan komparatif bangsa, didukung oleh kebijakan domestik nan-tepat untuk melindungi dan mengembangkan industri strategis

7. Persaingan Sehat.

Tugas pemerintah membangun iklim-persaingan domestik nan-sehat. Iklim persaingan domestik (DN) memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap daya saing bangsa. Persaingan domestik nan-sehat memaksa perusahaan untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi, kualitas dan produktivitas, sehingga berpotensi menghasilkan produk/layanan kelas dunia, yang pada akhirnya mendorong industri masuk pasar global.

Korelasi tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme utama, yang sering dirangkum dalam model keunggulan kompetitif atau *competitive advantage* (seperti "*Porter Diamond Theory*"):

- Peningkatan Efisiensi dan Inovasi: Persaingan ketat di pasar domestik mencegah perusahaan ber- puas diri, didorong untuk sel;alu mencari cara baru dalam menekan biaya, meningkatkan kualitas produk/jasa utama, berfikir kreatif cq berinovasi untuk mengungguli para pesaing domestik.
- Pengembangan Kapabilitas Global: Pemerintah membangun Iklim & struktur pasar domestik nan sehat persaingan domestik, lalu membangun iklim persaingan dengan barang/jasa impor, sedemikian rupa, sehingga perusahaan yang berhasil bertahan dan tumbuh dalam lingkungan domestik nan-kompetitif akan siap untuk bersaing & masuk pasar internasional.
- Permintaan Konsumen yang Canggih: Konsumen domestik yang menuntut kualitas memaksa perusahaan-domestik untuk memproduksi produk atau layanan kelas dunia. Sebagian konsumen adalah orang asing atau penduduk-asli yang pernah tinggal di LN. Tekanan dari jenis permintaan domestik nan-khas ini, bila tertengarai pengusaha-cerdas, niscaya menjadi katalisator penting bagi peningkatan daya saing nasional secara keseluruhan.
- Membangun Rantai Pasok yang Kuat: Persaingan yang sehat juga memacu pengembangan industri pendukung dan pemasok yang kuat dan efisien di dalam

negeri, menciptakan kluster industri yang saling menguntungkan dan meningkatkan daya saing kolektif.

- Menarik Investasi: Iklim persaingan dan investasi DN nan-sehat akan menarik lebih banyak investasi domestik dan asing, selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

Pemerintah memegang peran krusial dalam mencipta dan memelihara iklim persaingan domestik nan-sehat melalui regulasi dan kebijakan yang tepat, misalnya:

- Regulasi Anti-Monopoli: Menerapkan dan menegakkan undang-undang persaingan usaha nan- sehat untuk mencegah monopoli dan praktik tidak adil yang dapat menghambat inovasi.
- Penyediaan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang tepat menciptakan dampak-berganda dan mendukung iklim investasi serta kelancaran distribusi pasar.
- Kemudahan Berbisnis: Pemerintah berupaya mengurangi biaya birokrasi perizinan dan tarif perpajakan untuk mencipta kemudahan berbisnis, menghapus segala bentuk hambatan masuk pasar dan mendorong lebih banyak partisipan dalam persaingan bebas & sehat.

Disimpulkan bahwa iklim persaingan-domestik nan- sehat berfungsi sebagai "arena gym" atau "arena pelatihan", mempersiapkan perusahaan-domestik cq industri sektor-riil suatu bangsa untuk masuk pasar-global.

4. Determinan Budaya bangsa, rerata pendidikan formal, kualitas edukasi, human capital

- 4.1. Pada bangsa terdapat bagian budaya / karakter bangsa nan-buruk dan bagian budaya / karakter bangsa nan-baik dan tugas APBN/D kabinet memerangi karakter-bangsa nan-buruk & mendorong karakter-bangsa nan-baik. Daya-saing bangsa tak mungkin dibentuk dari karakter/budaya buruk. Daya saing bangsa terbentuk oleh budaya-baik, namun dihambat / dihancurkan oleh bagian budaya buruk.

Terdapat korelasi moral dan daya-saing, bangsa berkualitas tinggi bila bermoral-tinggi, lebih mudah membangun kemakmuran & daya-saing bangsa. Korelasi antara budaya bangsa dan daya saing bangsa bersifat dua arah, di mana budaya yang kuat dapat meningkatkan daya saing (misalnya, melalui identitas nasional, inovasi, dan nilai-nilai yang mendukung daya saing) dan sebaliknya, daya saing yang tinggi juga dapat memengaruhi dan membentuk budaya bangsa (misalnya melalui pengaruh globalisasi atau modernisasi). Keduanya saling berkaitan erat dan memengaruhi satu sama lain, bukan hanya dalam aspek positif tetapi juga bisa memiliki dampak negatif.

Pimpinan amoral tak mungkin membangun daya-saing bangsa. James Allen dalam karya tulis berjudul *Eight Pillars of Prosperity and Foundation Stones to Happiness and Success (2007)* memproposisi bahwa kesejahteraan/kemakmuran berpijak hanya pada fondasi moral, daya-saing tak mungkin tumbuh dari arogansi & ketidak-jujuran. Pimpinan negara nan-bermoral lebih berpeluang membangun kemakmuran bangsa dengan fondasi nan-konsisten dengan moral-ideal. Fondasi bangsa tersebut adalah energi, ekonomi, integritas, sistem, simpati/afeksi, ketulusan, ke berpihakan pada kebaikan dan kemandirian.

- Energi adalah sumber-kekuatan untuk berkarya, berdimensi keberanian mencoba dan gagal, kewaspadaan/kesiagaan, ketekunan dan kesungguhan hati, energi mencipta peluang meraih kemakmuran dan kebahagiaan, energi tak meminta syarat apapun dalam berkarya. Produktivitas itu nirsyarat, jangan diberi syarat.
- Ekonomi adalah ilmu tentang alternatif memperoleh kemakmuran cq daya-beli cq uang (?) untuk kehidupan seperti sandang, pangan, papan, paran, perlindungan sosial lain dan jalan-pikiran untuk memperoleh energi baru.
- Kesejahteraan langgeng berbasis moral cq integritas, tatkala tidak-jujur wajah dan bahasa tubuh memancarkan hal itu. Hanya pimpinan nan-jujur berpeluang memberi syarat jujur dan bertanggung-jawab bawahan kepadanya. Pimpinan jujur memperoleh kepercayaan pemangku-kepentingan dan bawahan, kepercayaan lalu menjadi dukungan.
- Sistem merupakan tata-cara baku nan-lengkap,rinci, berulang, tersepakati dimuka dan tak-boleh dilanggar siapapun, merupakan dasar ketertiban bangsa sebagai landasan mencipta efektivitas & efisiensi bangsa, memastikan rencana raihan-kinerja bangsa.
- Budaya simpati berkomponen kebaikan-hati, kedermawanan, budi-pekeri mulia, wawasan hidup dalam kasih (bukan kebencian apalagi amarah), bangsa mencipta iklim berendah-hati & menghormati segala sesuatu nan-baik, menghargai, selalu mensyukuri-mengasihi (afeksi) apapun nan-baik berbasis tingkah-laku nan-santun berlambar kerendahan-hati nan-tulus suci.
- Budaya berbasis fakta obyektif, budaya-rasional modern yang nir-prasangka atau nir-praduga bersalah sampai hukum positif memutuskan bersalah.
- Budaya ketulusan berbasis moral nan-baik menjernihkan udara-bangsa memudahkan bangsa memandang ke masa depan, sebaliknya; budaya keculasan/kebohongan dan arogansi mengeruhkan udara-bangsa dan sehingga tak-mampu memandang ke masa-depan. Ketulusan berdimensi kesederhanaan nir-palsuan indah, daya-tarik kemurnian-hati, kemampuan mengatasi /mengalahkan kekuatan destruktif.

4.2. Budaya bangsa yang dapat meningkatkan daya saing atau menurunkan daya-saing bangsa. Terdapat bangsa yang tak dapat mengangkat daya-saing bangsa cq mencapai kemakmuran lahir-batin karena bangsa berbudaya buruk.

- a. Identitas dan ketahanan budaya: Identitas nasional yang kuat, yang dibangun dari budaya bersama, dapat menjadi fondasi bagi ketahanan budaya dan kebanggaan nasional, yang penting untuk daya saing di kancah global. Terdapat budaya asli bangsa nan-baik bersifat konstruktif, mis. budaya fragmatis/rasional/produktif, budaya berani menegakkan kebenaran/keadilan, jujur, sopan-santun, setia, rajin, dan baik- hati vs budaya nan-buruk, mis. budaya bangsa nan-destruktif seperti budaya irasional & intoleran bahkan budaya- kebencian, budaya pengecut & pesimist, malas, culas, dengki, permusuhan, biadab, tak-bermoral, tidak setia, malas dan ber-hati kotor-jahat dst-nya berpengaruh pada pembangunan daya-saing bangsa.
- b. Inovasi dan adaptasi: Budaya yang menghargai inovasi dan adaptasi terhadap perubahan dapat mendorong daya saing. Misalnya, budaya yang berorientasi pada masa depan diri, keluarga dan bangsa cenderung lebih kompetitif secara global.

- c. Pemanfaatan keunggulan budaya: Budaya lokal dapat menjadi daya tarik unik untuk industri seperti pariwisata. Contohnya, dengan mengembangkan budaya lokal agar relevan dan mampu bersaing secara global.
- d. Nilai-nilai kolaboratif: Budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai seperti gotong royong dan kerja sama dapat mendukung daya saing dalam skala yang lebih luas, seperti dalam ekonomi atau bisnis.

Hubungan saling mempengaruhi. Bagaimana daya-saing bangsa memengaruhi budaya-bangsa, atau sebaliknya

- Pengaruh globalisasi: Daya saing global dapat membawa pengaruh budaya asing yang bisa mengikis nilai-nilai tradisional nan-luhur.
- Perubahan dalam sikap dan nilai: Terjadinya gesekan budaya antara generasi tua yang konservatif dan generasi muda yang cenderung mengadopsi tren global dapat mempercepat perubahan dalam budaya.
- Interaksi dan pertukaran: Meningkatnya daya saing dapat mendorong interaksi dan pertukaran budaya yang lebih intensif, baik secara positif maupun negatif, terutama karena multimedia. Hal ini bisa memperkaya budaya lokal, tetapi juga bisa memunculkan tantangan baru bagi identitas budaya yang sudah ada.

Sebagai kesimpulan, hubungan antara budaya bangsa dan daya saing bangsa adalah hubungan yang kompleks dan saling memengaruhi. Budaya dapat menjadi aset strategis untuk meningkatkan daya saing, namun juga rentan terhadap pengaruh luar akibat dorongan untuk meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terpadu dan holistik untuk menyeimbangkan pelestarian identitas budaya dengan adaptasi untuk bersaing di dunia global

- 4.3. Terdapat *korelasi positif dan sangat kuat* antara rerata (tingkat dan kualitas) pendidikan suatu bangsa dengan daya-saing bangsa tersebut. Semakin tinggi rerata pendidikan, semakin tinggi pula daya-saingnya di tingkat global. Kualitas daya-saing bangsa disebabkan tingkatan daya-pikir bangsa.

Hubungan ini dijelaskan melalui beberapa mekanisme utama:

- Peningkatan Kualitas SDM: Pendidikan yang berkualitas menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih, rajin, jujur, bertanggung-jawab, inovatif, dan kompeten menjadi modal utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi/kemakmuran bangsa.
- Peningkatan Produktivitas Bangsa: Individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih tinggi, berdampak langsung pada peningkatan produktivitas kerja perkapita.
- Inovasi dan Kreativitas: Sistem pendidikan yang baik mendorong kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Inovasi sangat penting dalam menghadapi perubahan global, berguna untuk memperbaiki kualitas hidup bangsa, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- Ketahanan Ekonomi: Bangsa dengan tingkat pendidikan yang tinggi menjadi lebih perkasa, lebih mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dinamika pasar internasional, sehingga lebih berdaya saing di pasar global.
- Penyerapan Tenaga Kerja Berkualitas: Tingkat pendidikan formal bangsa yang memadai memastikan tenaga kerja terserap di sektor-sektor industri

padat-teknologi yang menuntut keahlian spesifik, mengganti sektor padat karya.

Disimpulkan bahwa rerata tingkat pendidikan formal bangsa adalah faktor penentu daya-saing bangsa. Negara-negara maju teknologi & ekonomi umumnya memiliki sistem dan rerata pendidikan yang berkualitas tinggi.

Terdapat *korelasi yang sangat kuat dan positif* antara kualitas edukasi formal suatu bangsa dengan daya saing bangsa tersebut. Sistem pendidikan yang berkualitas secara langsung berkontribusi pada penciptaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, terampil, inovatif, dan siap bersaing di pasar global.

Berikut adalah penjelasan rinci mengenai hubungan kualitas SDM bangsa dengan produktivitas bangsa tersebut:

Pertama, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan formal yang bermutu adalah fondasi untuk pasar tenaga kerja profesional nan-kompeten. Melalui pendidikan, individu mengembangkan berbagai dimensi intelegensia yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan profesi terpilih, SDM yang berkualitas produktivitas nasional.

Kedua, Inovasi dan Kemajuan Teknologi. Kualitas pendidikan yang tinggi memupuk kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan inovasi. Lulusan dari sistem pendidikan nan-tinggi lebih mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta menciptakan solusi baru yang mendorong kemajuan ekonomi dan sosial bangsa.

Ketiga, Efisiensi Ekonomi dan Produktivitas. Tenaga kerja berpendidikan dan spesialis terlatih cenderung lebih efisien dalam menjalankan profesinya. Hal ini berdampak pada penurunan biaya produksi dan peningkatan produktivitas & kualitas produk/layanan, meningkatkan PDB.

Keempat, Peringkat Daya Saing Global. Berbagai laporan internasional, seperti yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*), secara konsisten menempatkan pilar pendidikan dan pengembangan keterampilan sebagai faktor kunci dalam Indeks Daya Saing Global. Negara-negara dengan peringkat daya-saing tinggi (misalnya, negara-negara Nordik, Jepang atau Singapura) umumnya memiliki sistem pendidikan formal berkualitas tinggi. Sebagai kesimpulan, semakin tinggi rata-rata tingkat dan kualitas pendidikan formal suatu negara, semakin maju dan kompetitif bangsa tersebut di arena global. Sebaliknya, kualitas pendidikan nan-rendah menyebabkan daya saing bangsa juga rendah.

Kelima, Human Capital.

Terdapat *korelasi yang sangat kuat dan positif* antara *human capital* (modal manusia) dan daya saing bangsa. *Human capital*, yang mencakupi pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan pengalaman tenaga kerja, merupakan *faktor penentu utama* kemajuan suatu negara dan kemampuannya untuk bersaing di arena global.

Komponen utama *human capital*

- Pengetahuan dan Keterampilan: Merujuk pada keahlian teknis (*hard skills*) dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
- Kesehatan: Kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik juga merupakan bagian dari modal manusia (*human capital*) karena memengaruhi produktivitas dan kinerja.
- Pengalaman: Pengalaman kerja dan daftar raihan yang terakumulasi dari waktu ke waktu dan sering kali diartikan sebagai kearifan nan-bernilai, sebagai aset tak berwujud bangsa.
- Kualitas lain: Termasuk aspek-aspek seperti kepemilikan berbagai jenis inteligensia, keberanian, ketegasan, integritas, loyalitas, kreativitas, dan kemampuan sosial.

Keenam, Peningkatan Produktivitas. Modal manusia yang berkualitas diperoleh bangsa melalui investasi-bangsa & APBN dalam dunia pendidikan dan pelatihan, secara langsung meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Individu yang terampil dan berpengetahuan dapat bekerja lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak, yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketujuh, Inovasi dan Efisiensi. Kualitas SDM yang unggul mendorong inovasi dan efisiensi di berbagai sektor perekonomian cq dalam menciptakan produk baru, layanan baru, dan proses baru yang memberikan keunggulan kompetitif.

Kedelapan, Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Pembangunan modal manusia penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka-panjang nan-berkelanjutan. Kualitas SDM bangsa kurang memadai menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak lestari.

Kesembilan, Ketahanan Bangsa dalam Persaingan Global. Pada era globalisasi, negara dengan SDM berkualitas lebih mampu bersaing di pasar global. Sebaliknya, SDM bangsa yang kurang kompeten cq tidak profesional dan tidak berintegritas menurunkan daya-saing bangsa.

Kesepuluh, Penggunaan Sumber Daya bangsa secara lebih baik karena kualitas SDM bangsa lebih-baik. Warga negara dan pekerja yang berpengetahuan & terampil memanfaatkan sumber daya bangsa, baik sumber daya alam maupun teknologi, dengan lebih optimal.

Kesebelas, Tak Jadi Soal Bila Tak Punya SDA. Tak peduli negara kaya SDA atau miskin SDA, negara yang berinvestasi ke dalam pengembangan *human capital* melalui pembentukan budaya nan-baik, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan nasional yang baik, dan pelatihan keterampilan yang relevan, cenderung memiliki daya saing ekonomi yang lebih tinggi.

Kedua-belas, Etos Kerja Bangsa. Pembangunan budaya etos-kerja. Tak ada gunanya terdidik cerdas-pandai kalau pemalas. Strategi membangun etos kerja bangsa meliputi penguatan budaya-kerja positif di tingkat individu dan institusi, peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan formal, pelatihan, serta peran aktif pemerintah dalam menciptakan sistem yang mendukung dan memberikan

contoh etos kerja yang baik. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan akademisi adalah kunci pembentuk budaya etos-kerja.

Inilah kunci sukses NKRI 2045.

Strategi pembangunan etos-kerja di tingkat individu (tiap warga-negara):

- Secara nasional, bangun/pelihara budaya produktif, tidak mudah menyerah, rajin, fokus dan tekun, hapus budaya nirtujuan hidup, santai dan malas.
- Tetapkan tujuan dan prioritas yang jelas: Fokus pada tujuan jangka pendek dan konsisten pada tujuan panjang atau cita-cita pribadi untuk memberikan arah pada pekerjaan terpilih.
- Tingkatkan disiplin diri: Biasakan diri untuk tidak menunda pekerjaan dan tetap fokus, kelola waktu dengan bijaksana.
- Bangun tanggung jawab dan integritas: Ambil tanggung jawab penuh atas pilihan-hidup, pekerjaan dan hasil yang dicapai, jaga integritas dalam setiap aspek kehidupan.
- Fokus pada kualitas dan komitmen diri: Berikan upaya/usaha terbaik, selalu fokus dan perhatikan kualitas pekerjaan, pamerkan dedikasi (penyerahan diri pada tugas) serta komitmen yang tinggi.
- Tingkatkan keterampilan diri: Selalu belajar & berlatih, berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran /pelatihan berkelanjutan.
- Kelola stres-kerja dan jaga keseimbangan fisik-mental : Kembangkan keterampilan mengelola tekanan kerja dan jaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan privat.
- Terbuka terhadap umpan balik: Selalu bersikap terbuka, mintalah, terima dan gunakan umpan balik sebagai sarana berkembang.

Birokrasi berlebih SDM nan-lamban dan pemalas tak mungkin membangun budaya-bangsa nan-rajin. Strategi di tingkat kelembagaan dan pemerintah

- Bangun /perkuat budaya-kerja positif: Terapkan nilai-nilai kerja nan-baik seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, setia, luwes & adaptif, dan kolaboratif.
- Pastikan pengawasan dan evaluasi yang konsisten atas diri dan bawahan: Lakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan standar kerja terpenuhi.
- Berikan apresiasi dan sanksi: Berikan penghargaan bagi bawahan yang berkinerja-baik untuk memotivasi, dan beri pelatihan bagi prestasi kurang, beri sanksi bagi pelanggaran aturan untuk menciptakan etos-disiplin.
- Ciptakan lingkungan kerja kondusif: Selalu berkontribusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung kolaborasi antar karyawan.
- Jadikan pemerintahan nan-baik sebagai teladan: Pemerintah nan-baik cq K/L unggulan, menunjukkan moral & etos- kerja yang baik dan menciptakan sistem yang merangsang etos kerja di masyarakat.

Sinergi antar pemangku kepentingan

- Kolaborasi pemerintah, swasta, dan akademisi: Kerjasama yang baik antar ketiga elemen ini dapat menciptakan iklim masyarakat yang unggul dan beretos kerja tinggi, yang dikenal sebagai *good governance*.

4.4. Membangun budaya-rajin dan tekun.

Memerangi budaya malas dalam sebuah bangsa adalah tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan multi-dimensi, melibatkan perubahan pola-pikir individu, keluarga, dan sistem sosial yang lebih luas. Berbagai strategi yang efektif meliputi:

4.4.1. Peran Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan adalah landasan utama dalam mengatasi kemalasan.

- Menanamkan Etos Kerja Sejak Dini: Kurikulum sekolah perlu menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, ketekunan, dan nilai-nilai kerja keras, tidak hanya sebagai teori, tetapi melalui praktik nyata dan proyek.
- Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Relevan: Memastikan sistem pendidikan menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan pasar. Hal ini mengurangi rasa putus asa atau ketidakmampuan yang sering menjadi akar kemalasan.
- Pembelajaran Sepanjang Hayat: Mendorong masyarakat untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman, alih-alih merasa puas atau stagnan.

4.4.2. Menciptakan Lingkungan yang Mendorong Produktivitas

Lingkungan sosial dan ekonomi berperan besar dalam pembangunan daya-saing bangsa.

- Tunjangan/Insentif dan Penghargaan yang Adil: Menerapkan sistem penghargaan yang adil dan transparan di tempat kerja dan masyarakat. Orang cenderung lebih termotivasi jika usaha mereka dihargai secara layak dan setara.
- Kepemimpinan yang Memberi Contoh: Pemimpin di semua tingkatan (pemerintah, bisnis, komunitas) harus menunjukkan integritas, kerja keras, dan dedikasi. Keteladanan sangat kuat dalam membentuk budaya.
- Mengurangi Birokrasi dan Korupsi: Birokrasi yang berbelit dan korupsi menciptakan apatisme. Ketika masyarakat melihat bahwa kerja keras tidak sepadan karena adanya "jalan pintas", motivasi untuk bekerja jujur akan menurun.

4.4.3. Memanfaatkan Teknologi dan Inovasi

Teknologi dapat digunakan untuk membuat pekerjaan lebih efisien dan efektif.

- Otomatisasi Tugas Rutin: Menggunakan teknologi untuk menghilangkan tugas-tugas yang membosankan dan berulang, memungkinkan orang untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kreatif dan bernilai tambah.
- Akses Informasi dan Peluang: Memanfaatkan teknologi info-maya, antara lain dengan menyediakan akses-informasi, pelatihan keterampilan menggunakan teknologi tertentu, dan peluang kerja berbasis teknologi.

4.4.4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Individu

- Menetapkan Sasaran yang Jelas: Membantu individu menetapkan tujuan hidup dan karier yang realistis dan terukur dalam lingkungan berteknologi tertentu.
- Menghilangkan Stigma Negatif Tugas/Pekerjaan: Mengubah pandangan bahwa pekerjaan tertentu "lebih rendah" atau "tidak keren".

- Kesehatan Mental dan Fisik: Mengatasi masalah kesehatan mental seperti stres, *burnout*, atau depresi akibat kerja-berlebih waktu/beban, yang sering disalahtafsir sebagai kemalasan.



- Memerangi budaya malas membutuhkan kesabaran membangun etos-kerja, konsistensi, dan komitmen jangka panjang dari seluruh elemen bangsa.

5. Kualitas kelembagaan, perubahan struktural negara dan pemerintahan.

Perubahan struktural negara memiliki korelasi yang sangat kuat dan positif terhadap daya saing bangsa. Transformasi ini dirancang untuk menciptakan lingkungan ekonomi dan kelembagaan yang lebih efisien, produktif, dan adaptif terhadap dinamika global, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan suatu negara untuk bersaing di pasar internasional. Presiden bertugas mengubah struktur APBN & kabinet cq K/L untuk meningkatkan efektivitas-kerja dan efisiensi Bangsa.

Bentuk Perubahan Struktural dan Dampaknya

- Pergeseran Sektor Ekonomi: Transformasi struktural melibatkan pergeseran basis ekonomi dari sektor primer (pertanian dan ekstraktif) ke sektor sekunder (industri manufaktur) dan tersier (jasa). Sektor industri dan jasa umumnya memiliki produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing nasional secara keseluruhan.
- Peningkatan Produktivitas: Reformasi struktural mendorong peningkatan produktivitas di semua sektor melalui investasi cerdas dalam teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Produktivitas yang lebih tinggi memungkinkan produksi barang dan jasa yang lebih efisien dan berkualitas, kunci utama daya saing.
- Perbaikan Kerangka Kelembagaan: Perubahan struktural mencakup reformasi di bidang hukum, birokrasi, dan aparatur negara. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan birokrasi yang efisien mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kepastian hukum, dan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik, yang semuanya berkontribusi pada daya saing.
- Pengembangan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infrastruktur yang maju merupakan bagian integral dari perubahan struktural untuk meningkatkan potensi dan daya saing daerah maupun nasional.
- Penciptaan Lingkungan Pro-Investasi: Reformasi ini bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi nasional dan menciptakan sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan, menarik investasi domestik dan asing yang krusial bagi daya saing.

Secara ringkas, perubahan struktural menciptakan fondasi yang kokoh bagi suatu bangsa untuk beradaptasi, berinovasi, dan bersaing secara efektif di panggung global, yang tercermin dalam peringkat daya saing internasional. Pemerintah Indonesia sendiri

secara aktif mempercepat agenda reformasi struktural untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Perubahan struktural pemerintahan memiliki korelasi yang kuat dan positif terhadap daya saing bangsa. Intinya, pemerintahan yang efisien, transparan, dan adaptif menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya mendorong daya saing global.

Korelasi ini dapat dilihat melalui beberapa mekanisme utama:

- **Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi:** Perubahan struktural, seperti reformasi birokrasi, bertujuan untuk menyederhanakan prosedur, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan meningkatkan disiplin aparatur negara. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan perizinan usaha, yang mengurangi biaya transaksi dan waktu bagi investor dan pelaku bisnis.
- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:** Transformasi organisasi pemerintahan melalui penataan struktur dan pengembangan budaya kerja yang lebih baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan publik yang baik, termasuk di bidang kesehatan dan pendidikan, akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, yang merupakan faktor penting dalam daya saing bangsa.
- **Membangun Kepercayaan Investor dan Stabilitas:** Stabilitas politik dan kerangka hukum yang kuat, yang dihasilkan dari tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan rasa aman bagi investor. Lingkungan yang stabil menarik investasi domestik dan asing, yang memacu perkembangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
- **Optimalisasi Belanja Pemerintah:** Melalui reformasi di bidang aparatur negara, kualitas belanja pemerintah, khususnya belanja modal di daerah, dapat ditingkatkan. Belanja yang tepat sasaran ini dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, logistik, dan sektor unggulan lainnya, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan potensi dan daya saing daerah.
- **Inovasi dan Adaptasi terhadap Tuntutan Global:** Perubahan struktural memungkinkan pemerintah untuk lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan globalisasi. Pemerintahan yang adaptif dapat merumuskan kebijakan industri hijau atau mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk memperkuat daya saing global.

Secara keseluruhan, perubahan struktural pemerintahan yang terencana dan sistematis berfungsi sebagai *fondasi yang kokoh* untuk menciptakan lingkungan yang mendorong produktivitas, inovasi, dan investasi, yang secara langsung memperkuat daya saing nasional di pasar global.

6. Tingkat Teknologi Bangsa

Presiden adalah pimpinan teknologi bangsa, berambisi membangun budaya sadar-teknologi. Tingkat teknologi suatu bangsa diukur berdasarkan beberapa kriteria dan indikator yang mencakupi aspek budaya penggunaan teknologi, penelitian, pengembangan, adopsi, dan dampak sosial ekonomi.

Sebagai misal hampir 100 % penduduk RRT melakukan pembayaran berbasis digital, sehingga praktis tak ada penggunaan uang tunai. Misal lain, teknologi kendaraan-darat berbasis listrik mengganti kendaraan berbasis fosil, terjadi pada berbagai negara.

Pengukuran ini tidak hanya melihat kemampuan menciptakan teknologi baru, tetapi juga seberapa luas teknologi tersebut digunakan dan memberikan manfaat.

Kriteria utama untuk mengukur tingkat teknologi suatu bangsa meliputi:

1. **Indikator Kuantitatif dan Indeks Global.** Negara sering menggunakan indeks standar untuk mengukur kemajuan teknologi:
 - a. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) / ICT Development Index (IDI): Indeks ini, yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dan digunakan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, mengukur akses, infrastruktur, penggunaan, dan keahlian TIK di masyarakat.
 - b. Indeks Inovasi Global (GII): Peringkat dalam indeks ini, yang dipublikasikan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), menunjukkan hasil inovasi suatu negara, termasuk paten dan publikasi ilmiah.
 - c. Bangsa bersifat agrikultur cq bercita-cita swasembada pangan meningkatkan daya-saing melalui penggunaan teknologi agrikultur modern.
2. **Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT/TRL).** *Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology Readiness Level/TRL)* adalah sistem pengukuran yang menilai kematangan teknologi tertentu, dari ide dasar hingga penerapan di lingkungan praktis/nyata. Semakin banyak teknologi yang mencapai TRL tinggi (level 8-9) dan diadopsi oleh industri dan/atau masyarakat, semakin maju tingkat teknologi bangsa tersebut.
3. **Faktor Ekonomi dan Sosial dalam Teknologi-Bangsa.** Kemajuan teknologi juga diukur melalui dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat:
 - Investasi Litbang (R&D) bangsa: Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan menunjukkan komitmen suatu bangsa terhadap inovasi.
 - Penerapan dan Adopsi Teknologi: Sebagai misal, tingkat penggunaan internet bangsa itu, tingkat penggunaan *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, dan teknologi canggih lainnya dalam kehidupan sehari-hari dan industri.
 - Sumber Daya Manusia (SDM) berkapasitas-digital : Kualitas dan kemampuan SDM produktif dalam menggunakan, memelihara, dan mengembangkan teknologi tulang-punggung bangsa, misalnya teknologi agrikultur dan akuakultur, teknologi kepadatan demografis dan transmigrasi, teknologi hijau dan teknologi prasarana pertanian sebuah negara seluas Eropa dengan lautan/laut & 17.500 pulau, adalah kriteria penting.
 - Kebijakan Pemerintah: Adanya kebijakan pro- inovasi yang koheren dan mendukung ekosistem teknologi yang kuat merupakan faktor penentu kemajuan.

Singkatnya, tingkat teknologi bangsa dinilai dari kapasitasnya untuk menciptakan, mengadaptasi, dan memanfaatkan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Terdapat *korelasi yang sangat kuat dan positif* antara tingkat teknologi suatu bangsa dengan daya-saing bangsanya. Kemajuan teknologi dan inovasi merupakan kunci utama untuk meningkatkan daya saing nasional di pasar global.

Logika Teknologi Meningkatkan Daya Saing Bangsa sbb :

- Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi: Teknologi apapun memungkinkan proses produksi dan operasional bernilai-tambah menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien. Otomatisasi dan optimalisasi proses mengurangi biaya produksi dan meningkatkan *output* ekonomi secara keseluruhan.
- Inovasi dan Penciptaan Nilai Tambah: Negara dengan tingkat teknologi tinggi lebih mampu berinovasi dan mengomersialkan produk serta layanan canggih bernilai tambah.
- Akses Pasar Global: Teknologi digital mempermudah akses ke pasar global. Pelaku usaha apapun, dapat menjual produk/jasanya ke luar negeri melalui platform *e-commerce*.
- Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Akses dan analisis data yang difasilitasi oleh teknologi canggih berbasis AI memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih otomatis & optimal dalam perencanaan strategis dan kebijakan nasional berbasis data.
- Ketahanan dan Keamanan Nasional: Teknologi dalam pertahanan dan keamanan negara berbasis digital, mendukung stabilitas lingkungan bisnis dan investasi.
- Pengembangan SDM: Teknologi memperluas akses terhadap pengetahuan dan peluang belajar, memungkinkan pengembangan keterampilan tenaga kerja.

Laporan seperti *IMD World Digital Competitiveness Ranking* secara konsisten menunjukkan bahwa negara-negara dengan adopsi teknologi digital yang tinggi, seperti AS dan Denmark, cenderung menempati peringkat teratas dalam *daya-saing digital global*.

Investasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptek) adalah fundamental untuk mendorong kemajuan dan daya-saing bangsa di kancah internasional.

Bagaimana cara mengukur tingkat teknologi bangsa ?

Tingkat teknologi suatu bangsa dapat diukur melalui berbagai indikator kuantitatif dan kualitatif. Tidak ada satu metrik tunggal, melainkan kombinasi beberapa faktor yang memberikan gambaran komprehensif.

Berikut adalah beberapa metode dan indikator umum yang digunakan lembaga internasional dan peneliti untuk mengukur tingkat teknologi antar bangsa:

1. Indikator Kuantitatif Utama bagi Daya-Saing Bangsa.

- Pengeluaran untuk Penelitian dan Pengembangan (Litbang/R&D): Diukur sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). Negara dengan investasi Litbang yang tinggi (seperti Korea Selatan, Israel, dan Amerika Serikat) umumnya dianggap lebih maju secara teknologi.
- Jumlah Paten yang Diajukan dan Diberikan: Ini mencerminkan tingkat inovasi dan kemampuan negara untuk menciptakan kekayaan intelektual baru, seringkali diukur melalui badan paten internasional seperti Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

- Ekspor Produk/Jasa Teknologi Tinggi: Proporsi total ekspor negara yang terdiri dari barang-barang berteknologi canggih (misalnya, elektronik canggih, mesin presisi, perangkat lunak) menunjukkan kemampuan manufaktur dan ekonomi berbasis pengetahuan [1].
- Penetrasi Internet dan Penggunaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi): Metrik ini mencakup jumlah absolut/relatif pengguna internet, kepemilikan ponsel pintar, dan akses ke infrastruktur digital, yang sering dilacak oleh International Telecommunication Union (ITU).

2. Indikator Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

Kemampuan suatu bangsa untuk memanfaatkan teknologi sangat bergantung pada kualitas SDM:

- Tingkat Pendidikan dan Keterampilan Digital: Persentase lulusan di bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM) serta literasi digital masyarakat secara umum [1].
- Infrastruktur Digital: Ketersediaan jaringan broadband berkecepatan tinggi, pusat data, dan keamanan siber nasional [1].

3. Dimensi Infrastruktur Teknologi.

Infrastruktur digital NKRI meliputi infrastruktur fisik seperti jaringan kabel serat optik (Palapa Ring), satelit (SATRIA-1), dan menara BTS, serta infrastruktur non-fisik seperti pusat data, *cloud computing*, *server*, perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur keamanan.

Infrastruktur fisik

- Jaringan kabel serat optik: Contohnya adalah Palapa Ring, jaringan yang menghubungkan ratusan kabupaten/kota di Indonesia untuk pemerataan akses *broadband*.
- Satelit: Proyek strategis seperti SATRIA-1 bertujuan menyediakan konektivitas internet yang merata, terutama di wilayah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan).
- Menara *Base Transceiver Station* (BTS): Berfungsi mengirim dan menerima sinyal radio untuk perangkat komunikasi seperti ponsel dan *gadget*.

Infrastruktur non-fisik

- *Cloud computing* dan *server*: Sumber daya komputasi yang memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara *online*.
- Pusat data (*Data Center*): Fasilitas fisik untuk menyimpan *server* dan peralatan jaringan lainnya.
- Perangkat keras dan lunak: Meliputi semua mesin fisik dan program yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem digital.
- Infrastruktur keamanan: Sistem dan perangkat lunak untuk melindungi data dan jaringan dari ancaman.
- Jaringan interkoneksi: Menghubungkan berbagai instansi pemerintah untuk pertukaran data.

Indeks Peringkat Global Tingkat Teknologi Bangsa

Beberapa organisasi global mengagregasi indikator-indikator di atas menjadi satu peringkat komposit untuk perbandingan internasional:

- Indeks Inovasi Global (*Global Innovation Index* - GII) Diterbitkan WIPO. Indeks tersebut ini melacak kinerja inovasi dari sekitar 130 zona ekonomi di seluruh dunia, mencakup input dan output inovasi secara luas.
- Indeks Kesiapan Jaringan (*Networked Readiness Index*): Beberapa laporan mengukur sejauh mana suatu negara siap memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh TIK.
- Indeks Daya Saing Global (*Global Competitiveness Index*): Diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*), indeks ini memiliki pilar khusus yang menilai kapasitas inovasi dan adopsi TIK suatu negara.

Peringkat Global dan Regional NKRI

- Daya Saing Digital Dunia (*IMD World Digital Competitiveness Ranking*): Indonesia menunjukkan kenaikan ke peringkat 43 dari 67 negara pada tahun 2024, naik dua peringkat dari tahun sebelumnya. Namun, pada laporan terbaru November 2025, peringkat Indonesia dilaporkan menurun tajam ke posisi 51.
- E-Government Development Index (EGDI) PBB: Pada laporan "E-government Survey 2024" yang dirilis PBB, Indonesia berada di peringkat 64 dari 193 negara di dunia, mengalami lompatan 13 peringkat dari posisi sebelumnya.
- Sistem E-Government di ASEAN: Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat ke-4 untuk sistem e-government terbaik.
- *Global Innovation Index* (GII): Indonesia berada di peringkat 59 dalam hasil inovasi pada tahun 2024, posisi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Indeks Internal NKRI

- Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI): Indeks internal yang diukur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ini mencapai skor 44,53% pada tahun 2025, naik dari tahun sebelumnya, menandakan peningkatan literasi-digital dan kemampuan-digital masyarakat.
- Indeks Digital Provinsi di Indonesia mengukur kecakapan digital masyarakat, dengan DKI Jakarta sering menduduki peringkat teratas (misalnya skor 56,97 pada IMDI 2025) diikuti provinsi seperti Bangka Belitung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, menunjukkan konsentrasi di Jawa dan wilayah maju lainnya, sementara ada peningkatan merata di seluruh provinsi seiring dengan program Kominfo untuk pemerataan transformasi digital. Pengukuran ini dilakukan melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang mencakup pilar infrastruktur, literasi, dan pemberdayaan untuk memandu kebijakan daerah.

Provinsi dengan Indeks Tertinggi (2025):

- DKI Jakarta: 56,97 (Skor tertinggi).
- Kepulauan Bangka Belitung: 52,15.
- Jawa Barat: 52,05.
- Jawa Tengah: 51,19.
- DI Yogyakarta (DIY): Skor di atas 50.

Tujuan Indeks Digital:

- Mengukur keterampilan digital penduduk dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan.

- Menjadi panduan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan program pengembangan SDM digital yang tepat sasaran.

Pilar Utama IMDI:

1. Infrastruktur dan Ekosistem: Ketersediaan dan kualitas jaringan serta layanan digital.
2. Literasi Digital: Kemampuan individu menggunakan teknologi.
3. Pemberdayaan: Pemanfaatan teknologi untuk ekonomi, sosial, dan budaya.

Indeks Literasi Digital di tingkat kabupaten/kota

Indeks Literasi Digital di tingkat kabupaten/kota diukur melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yang dilakukan Kementerian Kominfo, mengukur kompetensi digital 4 pilar: Keterampilan (Skill), Etika (Ethics), Keamanan (Safety), dan Budaya (Culture), hasilnya tersedia secara tahunan (seperti IMDI 2023, IMDI 2025) di platform resmi, dan hasilnya bisa dilihat di berbagai laporan daerah seperti contohnya di Kabupaten Sleman atau provinsi dengan skor tertinggi seperti DI Yogyakarta dan Kalbar. IMDI adalah alat ukur kompetensi dan keterampilan digital masyarakat di 514 kabupaten/kota se-Indonesia, bertujuan untuk membantu perumusan kebijakan pengembangan SDM digital yang tepat sasaran. Pilar Pengukuran IMDI:

- a. Digital Skill (Keterampilan Digital)
- b. Digital Ethics (Etika Digital)
- c. Digital Safety (Keamanan Digital)
- d. Digital Culture (Budaya Digital).

Hasil IMDI dirilis secara nasional dan per wilayah (provinsi/kabupaten/kota) setiap tahun, dapat dilihat pada situs resmi seperti SDM Digital atau laporannya di Katadata. Sebagai ilustrasi, berikut adalah kabupaten/kota dengan skor tertinggi di masing-masing wilayah (2025):

- Wilayah Barat: Kota Bandung memimpin di wilayah ini, diikuti oleh Kota Malang dan Jakarta Barat.
- Wilayah Tengah: Kota Bontang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kota Tarakan mencatatkan skor tertinggi.
- Wilayah Timur: Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong meraih skor tertinggi di kawasan ini.

Peringkat berdasar survei Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama dengan mitra, dan data lengkapnya dapat diakses melalui situs resmi imdi.sdmdigital.id.

Indeks Digital Desa

Indeks Digital Desa merujuk pada upaya mengukur dan meningkatkan digitalisasi desa di Indonesia, seringkali terkait erat dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengukur kemajuan desa secara holistik (sosial, ekonomi, lingkungan) melalui dimensi digital, serta platform seperti DIGIDES yang menyediakan solusi teknologi untuk administrasi, pelayanan publik, dan promosi desa. Ini mencakup infrastruktur internet, literasi digital masyarakat, dan integrasi teknologi dalam tata kelola desa untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan kemandirian desa, sejalan dengan Program Desa Digital.

Konsep Indeks Digital Desa

- Indeks Desa Membangun (IDM): Alat ukur resmi untuk menilai status kemajuan desa, yang kini memasukkan dimensi digital. IDM mengukur ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, termasuk aspek pelayanan publik dan aksesibilitas digital.
- Dimensi Digital: Meliputi layanan dasar (pendidikan, kesehatan), layanan sosial, ekonomi (produksi, fasilitas), lingkungan, aksesibilitas (jalan, tol), dan tata kelola pemerintahan desa, yang semakin diukur dengan indikator digital.

Platform dan Solusi Digital

- DIGIDES (PT Digital Desa Indonesia): Platform terintegrasi berbasis web/Android untuk administrasi desa, pelayanan kependudukan, website desa, dan pengelolaan data, membantu desa terhubung dengan IDM dan SDGs Desa.
- Program Desa Digital: Inisiatif pengembangan infrastruktur internet, pelatihan literasi digital, serta aplikasi teknologi untuk layanan desa, didukung oleh Dana Desa.

Contoh Penerapan

- Desa-desa seperti Senga Selatan, Loa Duri Ilir, dan Manunggu telah mengadopsi teknologi untuk meningkatkan pelayanan dan membangun *smart village*.
- Cek status IDM desa tertentu melalui situs resmi Kemendes (sid.kemendes.go.id/idm) atau situs terkait seperti digitaldesa.id/artikel/desa-kita-sudah-masuk-kategori-desa-mandiri-yuk-cek-disini.

Sebagai kesimpulan, Indonesia terus berupaya mengakselerasi transformasi digital dengan fokus pada inovasi, investasi di bidang semikonduktor, dan pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (AI). Meskipun terdapat fluktuasi peringkat dalam laporan yang berbeda, tren jangka panjang menunjukkan komitmen pemerintah dan peningkatan adopsi teknologi di masyarakat.

Indeks Pornografi

Sumber CNA, 2025, menyajikan artikel berjudul *Mencemaskan! Indonesia ranking 4 dunia kasus pornografi anak*, menyatakan bahwa pemerintah fokus menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak, salah satunya adalah dengan moderasi konten. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), mengungkapkan bahwa Indonesia menempati peringkat keempat tertinggi dunia dalam kasus pornografi anak. Data tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak-anak. Laporan dari *National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)* juga menyebut Indonesia berada di posisi kedua di Asia Tenggara dalam kasus serupa. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan berbagai langkah untuk melindungi anak-anak di dunia maya.

- Kementerian menghadirkan sistem kepatuhan moderasi konten yang mewajibkan platform mengikuti aturan yang berlaku, jika tidak, mereka akan dikenai denda.
- Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan regulasi khusus untuk perlindungan anak di internet. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar regulasi ini segera dirampungkan.
- Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk UNICEF dan *Save the Children*, untuk menyusun peraturan tersebut. Salah satu prinsip utama dalam regulasi ini adalah pembatasan akun

media sosial bagi anak-anak di bawah usia tertentu, bukan berarti membatasi akses mereka terhadap internet, tetapi mereka hanya bisa menggunakannya melalui izin orang tua. Dengan begitu, aturan ini juga mendorong pendampingan keluarga dalam penggunaan internet.

- Regulasi ini juga akan mengatur sanksi bagi platform digital atau Penyelenggara Sistem Elektronik yang melanggar ketentuan perlindungan anak.
- Selain kebijakan moderasi konten dan regulasi akun media sosial, pemerintah juga menyusun pedoman pemberitaan yang ramah anak dan perempuan. Upaya ini dilakukan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Dewan Pers. Kebijakan ini menjadi pedoman dan komitmen bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, industri teknologi, masyarakat, hingga komunitas. Tujuannya adalah menciptakan ruang digital yang lebih aman.

4. Kebijakan Industri

Kebijakan industri negara adalah serangkaian strategi dan intervensi pemerintah untuk mendorong dan membentuk kembali struktur produksi suatu negara, dengan tujuan utama meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kemakmuran industri. Kebijakan ini dapat mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti subsidi, insentif pajak, perlindungan perdagangan, dan investasi dalam infrastruktur atau teknologi untuk sektor-sektor tertentu.

Tujuan kebijakan industri

- Meningkatkan daya saing bangsa: Membantu industri domestik bersaing di pasar global.
- Transformasi ekonomi: Mengalihkan perekonomian dari kegiatan berproduktivitas rendah ke tinggi.
- Mendorong inovasi: Mendukung pengembangan teknologi dan riset.
- Menciptakan lapangan kerja: Menumbuhkan industri yang dapat menyerap tenaga kerja.
- Meningkatkan nilai tambah: Memastikan produk lokal memiliki nilai tambah yang tinggi.

Contoh bentuk intervensi pemerintah



- Subsidi: Pemberian bantuan finansial kepada perusahaan atau sektor tertentu.
- Insentif pajak: Pengurangan atau penangguhan pajak untuk mendorong investasi.
- Perlindungan perdagangan: Penerapan tarif atau hambatan impor untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing.
- Investasi infrastruktur: Pembangunan jalan, pelabuhan, dan jaringan komunikasi untuk mendukung kegiatan industri.
- Kebijakan pengadaan publik: Aturan pengadaan pemerintah yang memprioritaskan produk industri dalam negeri.

Berbagai pendekatan kebijakan industri

- "Vertikal": Berfokus pada sektor atau perusahaan tertentu yang dianggap memiliki prospek pertumbuhan tinggi.
- "Horizontal": Meliputi kebijakan menyeluruh yang tidak memihak sektor tertentu, misalnya dalam bidang infrastruktur atau pendidikan.

Hubungan Kebijakan Industri dengan Daya-Saing Bangsa sbb :

Kebijakan industrial yang dapat meningkatkan daya saing bangsa meliputi

- Kebijakan fiskal dan non-fiskal yang mendukung investasi dan inovasi, seperti insentif pajak (*tax allowance*, *tax holiday*) dan kemudahan non-fiskal, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terampil melalui pelatihan dan pendidikan vokasi yang relevan, serta penguatan ekosistem industri seperti kawasan industri terpadu dan kolaborasi antar industri.
- Selain itu, kebijakan pro-pasar seperti perjanjian dagang dan promosi produk lokal juga diperlukan, seiring dengan standardisasi produk untuk memenuhi standar kualitas internasional.

5. Kebijakan Fiskal.

Jenis kebijakan fiskal dan nonfiskal sbb :

- a. Kebijakan insentif dan dukungan fiskal
 - Fasilitas fiskal: Memberikan insentif seperti *tax allowance*, *tax holiday*, dan *investment allowance* untuk mendorong investasi di sektor industri.
 - Kemudahan non-fiskal: Menyediakan dukungan seperti jaminan investasi dan akses terhadap harga komoditas tertentu yang stabil.
- b. Peningkatan sumber daya manusia (SDM)
 - Pelatihan dan vokasi: Memperkuat kerja sama antara industri dan lembaga pendidikan untuk menyelaraskan kurikulum dan pelatihan dengan kebutuhan industri modern, seperti pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi.
 - Insentif R&D: Memberikan insentif seperti *super tax deduction* bagi industri yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), yang juga dapat mendorong pengembangan SDM.
- c. Penguatan ekosistem industri
 - Kawasan industri terpadu: Mendorong pembentukan kawasan yang menggabungkan berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok dan sinergi antar perusahaan.
 - Kolaborasi industri: Mendorong kolaborasi antara perusahaan besar dan kecil, serta kolaborasi lintas sektor untuk berbagi teknologi, jaringan, dan praktik terbaik.
- d. Standardisasi dan kualitas produk NKRI
 - Standar nasional: Menerapkan standar nasional (SNI) secara wajib di berbagai sektor untuk menjamin kualitas produk dan efisiensi industri, yang juga mendukung daya saing di pasar internasional.
 - Produk hijau dan berkelanjutan: Mendorong industri untuk mengadopsi praktik industri hijau demi efisiensi sumber daya, kepatuhan terhadap regulasi internasional (seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism*), dan akses pasar yang lebih luas.
- e. Akses ke pasar-global dan promosi

- Perjanjian dagang: Memperluas kerja sama perjanjian perdagangan (bilateral atau multilateral) seperti *Free Trade Agreement* (FTA) dan *Preferential Trade Agreement* (PTA) untuk membuka pasar baru.
- Promosi: Meningkatkan promosi-global produk/jasa- domestik untuk menarik perhatian pembeli dari luar negeri dan mendorong permintaan.
- Standar halal di Indonesia diatur dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Pada tahun 2025, fokus utama adalah pada implementasi kewajiban sertifikasi halal untuk berbagai produk dan penyempurnaan prosedur layanan. Sertifikasi halal sudah wajib dengan tenggat waktu bertahap:
- Produk Makanan dan Minuman: Wajib bersertifikat halal paling lambat pada 17 Oktober 2026. Produk yang tidak bersertifikat setelah tanggal tersebut akan dianggap tidak mematuhi hukum.
- Produk Kosmetik dan Obat-obatan: Diperkirakan wajib bersertifikat halal pada Oktober 2026.
- Produk Impor: Kewajiban sertifikasi halal untuk produk impor juga akan berlaku, dengan penundaan penerapan penuh hingga tahun 2026.

Pada tahun 2025, BPJPH telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk memperjelas standar dan prosedur:

- Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH): Pelaku usaha wajib menerapkan SJPH, yang mencakup 11 kriteria seperti kebijakan halal, tim manajemen halal, bahan, fasilitas produksi, prosedur aktivitas kritis, dan kemampuan telusur produk.
 - Label Halal Indonesia: Terdapat penegasan mengenai kewajiban pencantuman label halal Indonesia pada produk yang telah bersertifikat, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No. 7 Tahun 2025.
 - Masa Berlaku: Sertifikat halal yang diterbitkan memiliki masa berlaku 4 (empat) tahun.
 - Fasilitasi Sertifikasi Gratis (Sehati): Pemerintah melalui BPJPH menyediakan program sertifikasi halal gratis, terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), untuk mempercepat kepatuhan.
 - Prosedur dan Biaya: Prosedur permohonan sertifikasi halal diatur secara rinci, termasuk biaya yang bervariasi tergantung skala usaha (UMK, menengah, besar).
 - Informasi lebih detail mengenai standar dan prosedur dapat diakses melalui situs resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan LPPOM MUI.
- f. Kebijakan protektif dan inovasi
- Proteksi industri: Menerapkan politik proteksi untuk melindungi industri dalam negeri yang masih pada tahap bayi/tumbuh (*infant industry*) dari tekanan persaingan produk impor.
 - Inovasi: Mendorong inovasi dan digitalisasi di seluruh sektor industri untuk meningkatkan produktivitas dan daya-saing global.

6. Tingkat & kualitas infrastruktur bangsa

Sebagai contoh, Swiss menanjak menjadi negara-makmur dengan mencipta daya-tarik investasi PMA/PMDN dengan penyediaan infrastruktur nan-ideal. Dimensi infrastruktur daya-saing berupa falsafah negara yang penting bagi daya saing bangsa Indonesia berakar pada tujuan nasional untuk mencapai kesejahteraan umum, pemerataan pembangunan, dan persatuan bangsa. Aspek-aspek filosofis ini diterjemahkan ke dalam pembangunan infrastruktur yang holistik, tidak hanya berfokus pada aspek fisik/ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya, sbb :

- **Dimensi Ekonomi (Kesejahteraan dan Pertumbuhan)**

Falsafah negara memandang infrastruktur sebagai pilar utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan produktivitas bangsa.

- Peningkatan Produktivitas: Infrastruktur (seperti energi, prasarana, transportasi, dan komunikasi) menyediakan layanan krusial yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi yang efisien.
- Efisiensi Logistik: Jaringan transportasi yang baik, seperti jalan tol dan pelabuhan, secara signifikan mengurangi biaya logistik, membuat produk nasional lebih kompetitif di pasar global.
- Menarik Investasi: Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi daya tarik utama bagi investor, yang pada gilirannya memacu pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

- **Dimensi Sosial & Geografis (Pemerataan dan Konektivitas)**

Sesuai dengan prinsip keadilan sosial, pembangunan infrastruktur nan-merata dan bukan Jawa-centric adalah untuk pemeratakan hasil pembangunan di seluruh pelosok negeri secara merata, sebagai berikut.

- Sarana pemerataan kepadatan penduduk: Apabila daerah kosong-penduduk dilengkapi prasarana lebih mudah dihuni transmigran. Pemerintah mempromosikan daerah tujuan transmigrasi sukarela.
- Alat Pemersatu Bangsa: Di negara kepulauan seperti Indonesia, infrastruktur (terutama konektivitas) berfungsi sebagai alat pemersatu yang menghubungkan berbagai daerah, suku, dan budaya, memperkuat rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap tanah air.
- Akses kepada Layanan Publik: Membuka akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, irigasi, dan listrik bagi seluruh masyarakat, yang merupakan hak dasar warga negara. RS apapun wajib menerima kedatangan pasien apapun, sepanjang menunjukkan KTP.
- Mengurangi Kesenjangan: Pemerataan infrastruktur antar daerah menjadi bagian penting dalam mengurangi disparitas ekonomi dan sosial.

- **Dimensi Ketahanan dan Kelestarian**

Falsafah pembangunan yang berkelanjutan juga menekankan pentingnya infrastruktur yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga tangguh dan ramah lingkungan.

- Ketahanan Nasional: Infrastruktur kritis (seperti ketahanan pangan, air, dan energi) sangat penting untuk ketahanan nasional.
- Pembangunan Berkelanjutan: Memastikan bahwa pembangunan/pemeliharaan infrastruktur dilakukan secara selaras dengan alam dan dapat di wariskan / di nikmati generasi mendatang, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pemerintah selalu

melindungi hutan-primer dari degradasi/kerusakan akibat penebangan berizin dan liar.

- **Dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi.**

Pilar daya saing juga mencakup aspek non-fisik, antara lain kualitas SDM Bangsa dan adopsi teknologi, sbb :

1. Fondasi SDM Berkualitas: Pembangunan infrastruktur juga mencakup penyediaan SDM konstruksi yang berkualitas sebagai fondasi agar proyek berjalan lancar dan menghasilkan output yang optimal.
2. Adopsi TIK: Infrastruktur umumnya, digital khususnya, menjadi semakin penting sebagai motor pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, memungkinkan kegiatan ekonomi tetap berjalan efisien di era digital.

- **Klasifikasi Infrastruktur.**

Pada tataran konseptual, kategori utama infrastruktur nan-berisiko tumpang-tindih antara lain sbb:

- Infrastruktur Konstitusional : Mencakupi falsafah negara, UUD dan hukum-positif berkualitas.
- Infrastruktur bangunan fisik, antara lain perbatasan negara, Ibu Kota, jalan-raya, pelabuhan dan lain-lain.
- Infrastruktur perindustrian, perdagangan dan pertanian.
- Infrastruktur Transportasi darat, udara dan laut,
- Infrastruktur Energi.
- Infrastruktur Telekomunikasi.
- Infrastruktur Air dan Sanitasi.
- Infrastruktur Sosial, mencakupi fasos & fasum.

- **Infrastruktur pertanian.**

Infrastruktur pertanian berkorelasi positif dengan daya-saing bangsa meliputi berbagai elemen kunci sbb :

- a. Irigasi dan Pengelolaan Air: Sistem irigasi yang efisien (seperti irigasi tetes atau waduk/saluran air yang terpelihara) memastikan pasokan air yang stabil untuk tanaman, mengurangi risiko kekeringan, dan memungkinkan petani untuk panen lebih sering.
- b. Jalan Pertanian dan Transportasi Pertanian: Infrastruktur jalan yang baik menghubungkan daerah produksi pertanian ke pasar lokal, regional, dan ekspor. Ini mengurangi biaya transportasi dan waktu pengiriman, meminimalkan kerugian pascapanen, dan meningkatkan aksesibilitas bagi petani kepada wilayah input pertanian dan pasar.
- c. Fasilitas Penyimpanan dan Logistik (Gudang, Cold Storage): waduk, gudang, lumbung, dan fasilitas penyimpanan modern bagi input atau output pertanian.
- d. Fasilitas Energi (Listrik dan Bahan Bakar).
- e. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Akses internet dan layanan komunikasi bidang pertanian.
- f. Kawasan Pertanian, kawasan Industri hasil-pertanian dan Zona Ekonomi Khusus (KEK).

Kombinasian infrastruktur terintegrasi optimal secara kolektif meningkatkan kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa secara efisien,

bersaing di pasar global, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- **Infrastruktur industri keuangan dan pasar modal.**

Infrastruktur industri-keuangan dan pasar-modal yang berkorelasi positif dengan daya saing bangsa adalah yang menciptakan stabilitas, efisiensi, dan aksesibilitas dalam menggerakkan dana untuk kegiatan ekonomi produktif, termasuk pembiayaan pembangunan fisik seperti infrastruktur transportasi dan energi.

Infrastruktur kunci tersebut meliputi:

- **Infrastruktur Industri Keuangan**

- a. Sistem Perbankan yang Efektif, Efisien, Stabil dan Inklusif: Bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) berfungsi sebagai tulang punggung intermediasi keuangan, menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit untuk kegiatan produktif, termasuk UMKM. Akses keuangan yang luas (inklusi keuangan) memungkinkan lebih banyak individu dan bisnis untuk berpartisipasi dalam perekonomian.
- b. Otoritas Pengawasan dan Regulasi yang Kuat: Lembaga seperti Bank Sentral & Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Regulasi yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten (seperti prosedur kepailitan dan hak-hak kreditur yang jelas) meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi risiko sistemik.
- c. Infrastruktur Pembayaran Modern: Sistem pembayaran yang efisien, aman, dan cepat (seperti Sistem Pembayaran Indonesia Nasional/SNAP) mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan konektivitas ekonomi antar wilayah dan global.
- d. Pusat Kliring Sentral (CCP) dan Sistem Penyelesaian Transaksi: Adanya CCP untuk transaksi derivatif (seperti yang diluncurkan oleh Bank Indonesia) membantu mitigasi risiko kredit dan likuiditas, menjadikan pasar keuangan lebih tangguh dan efisien.

- **Infrastruktur Pasar Modal**

- a. Bursa Efek yang Efisien: Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai tempat perdagangan sekuritas (saham, obligasi, reksa dana) berfungsi sebagai sarana vital untuk mobilisasi dana jangka panjang dari masyarakat ke proyek-proyek produktif, termasuk pembiayaan proyek infrastruktur besar.
- b. Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek: Lembaga seperti KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia) dan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) memastikan proses kliring dan penyelesaian transaksi berjalan lancar, aman, dan efisien, sehingga menjaga kepercayaan investor.
- c. Hukum positif Transparansi dan Perlindungan Investor: Kerangka hukum dan operasional yang kuat untuk melindungi investor (misalnya, melalui keterbukaan informasi emiten) sangat penting untuk menarik modal domestik dan asing, yang secara langsung berdampak pada daya saing investasi.

- d. Instrumen Pembiayaan Inovatif: Pengembangan instrumen keuangan yang beragam, seperti skema pembiayaan kreatif untuk proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui pasar modal, membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas infrastruktur nasional.

Secara keseluruhan, infrastruktur tersebut di atas berkorelasi positif dengan daya saing bangsa karena memfasilitasi alokasi modal yang optimal, meningkatkan efisiensi logistik melalui pembangunan fisik yang dibiayai, dan membangun kepercayaan pasar global terhadap stabilitas ekonomi nasional.

- **Infrastruktur Bank Sentral.**

Infrastruktur bank sentral yang berkorelasi positif dengan daya saing bangsa, meliputi stabilitas sistem keuangan dan moneter, serta sistem pembayaran yang efisien dan modern, bertujuan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan investasi.

- Stabilitas Moneter dan Keuangan. Bank sentral (misalnya Bank Indonesia) berperan penting dalam menjaga stabilitas harga (mengendalikan inflasi) dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Lingkungan ekonomi yang sehat dan stabil sangat penting untuk daya saing bangsa karena:
 - a.1. Menarik Investasi: Stabilitas harga dan keuangan mengurangi ketidakpastian bagi investor domestik dan asing, sehingga mendorong masuknya investasi yang penting untuk pertumbuhan ekonomi.
 - a.2. Efisiensi Alokasi Modal: Sistem perbankan yang sehat dan diawasi dengan baik (infrastruktur pengawasan dan regulasi) memastikan sumber daya finansial dialokasikan secara efisien untuk proyek-proyek produktif, termasuk UMKM dan proyek infrastruktur.
- Sistem pembayaran modern nan-Efisien dan aman penting untuk mendukung aktivitas-ekonomi secara efektif dan efisien sbb :
 - Meningkatkan Efisiensi Transaksi: Sistem pembayaran ritel dan grosir yang dikelola bank sentral (mis. Sistem Pembayaran Ritel Bank Indonesia) memungkinkan transaksi bisnis berjalan aman & lancar.
 - Mendukung Ekonomi Digital: Bank sentral juga bertindak sebagai inovator dan katalisator ekonomi-digital, misalnya melalui pengembangan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) dan penguatan pengawasan terhadap *fintech*.

Kebijakan Moneter yang Efektif: Kerangka kebijakan moneter bank sentral adalah infrastruktur kelembagaan yang vital. Kemampuan bank sentral untuk menetapkan suku bunga acuan dan mengelola jumlah uang beredar secara efektif membantu menjaga stabilitas ekonomi makro, yang merupakan prasyarat daya saing jangka panjang.

Secara keseluruhan, infrastruktur bank sentral sebuah bangsa menciptakan fondasi stabilitas dan efisiensi yang memungkinkan sektor swasta dan pemerintah untuk beroperasi secara efektif dan kompetitif di pasar global.

- **Infrastruktur Pertahanan Negara**

Infrastruktur pertahanan negara memiliki beberapa dimensi penting yang saling terkait untuk menjamin keamanan dan kedaulatan nasional. Dimensi-dimensi utama tersebut mencakupi aspek fisik pertahanan negara, teknologi pertahanan-negara, SDM pertahanan-negara, kebijakan/strategi pertahanan-negara, sbb :

- Infrastruktur spiritual nonkasad mata antara lain adalah moral, etika, disiplin, keberanian prajurit berkorban bagi negara.
- Dimensi Infrastruktur Fisik (Sarana & Prasarana): Sebagai fondasi kasad-mata yang mendukung operasi militer dan keamanan secara umum.
 - Fasilitas Militer: Antara lain adalah pangkalan militer (darat, laut, udara), barak, gudang amunisi, depo logistik, dan area latihan.
 - Infrastruktur Kritis: Meliputi pelabuhan laut militer, bandara, jaringan jalan dan kereta api strategis, serta instalasi energi yang penting untuk pergerakan personel dan logistik.
 - Ruang Juang: Pengelolaan tata ruang wilayah darat, laut, dan udara yang mendukung operasi pertahanan negara.
- Dimensi Teknologi dan Digital : Keunggulan teknologi pertahanan sangat krusial bagi bangsa, sbb :
 - a. Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista): Modernisasi dan pengembangan Alutsista yang canggih.
 - b. Sistem Komunikasi: Jaringan komunikasi terenkripsi dan handal untuk komando dan kontrol yang efektif.
 - c. Keamanan Maya (*Cybersecurity*): Pembangunan pusat keamanan siber dan integrasi teknologi terbaru untuk melawan ancaman siber yang semakin kompleks.
 - d. Pusat Data: Fasilitas pusat data yang aman sebagai basis untuk analisis data dan pengambilan keputusan strategis.
- Dimensi Sumber Daya Manusia (SDM)Militer: Personel berkualitas adalah penggerak utama dari semua infrastruktur lain.
 - Personel Militer: Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama yang terlatih dan siap digunakan.
 - Komponen Pendukung: Melibatkan warga negara terlatih, tenaga ahli, dan komponen cadangan yang mendukung kekuatan utama.
 - Pendidikan dan Pelatihan: Lembaga pendidikan dan pelatihan militer yang berkualitas untuk penyiapan personel yang kompeten.
- Dimensi Industri dan Logistik Militer: Kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pertahanan sangat penting untuk ketahanan nasional.
 - Industri Pertahanan: Pengembangan industri pertahanan dalam negeri yang kuat dan mandiri untuk memproduksi Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan).
 - Rantai Pasok: Logistik nanefisien dan rantai pasok yang aman untuk memastikan ketersediaan perbekalan dan layanan.
- Dimensi Kebijakan dan Strategi: Semua dimensi di atas harus terintegrasi dalam kerangka kebijakan dan strategi yang jelas.
 - Sistem Pertahanan Semesta (Sishankamrata): Pengelolaan seluruh komponen (utama, cadangan, pendukung) secara terkoordinasi dan sinergis sesuai doktrin pertahanan negara.
 - Perencanaan Jangka Panjang: Rencana strategis kementerian dan lembaga terkait untuk pembangunan kekuatan pertahanan yang konsisten dan berkesinambungan.

- Keputusan taktis berdasar komando nan-kompeten.

Infrastruktur pertahanan nan-tangguh bukan hanya tentang fasilitas militer, namun juga melibatkan ekosistem yang lebih luas, mulai dari teknologi-pertahanan mutakhir hingga SDM nan-kompeten, diramu dalam kebijakan-pertahanan berkualitas tinggi.

- **Infrastruktur & Kebijakan perpajakan**

Penerapan prinsip pajak dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dalam sistem perpajakan mendukung pembangunan daya-saing bangsa berdasar prinsip sbb:

- Keadilan (Equity): Sistem harus memastikan pemungutan pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan tidak diskriminatif, mendorong kohesi sosial dan stabilitas ekonomi.
- Kepastian Hukum (Certainty): Adanya hukum-positif berorientasi kepada daya-saing bangsa, diterapkan secara jelas dan konsisten memberikan kepastian bagi investor dan pelaku bisnis, berdaya tarik investasi.
- Kesederhanaan dan Kemudahan Administrasi (Simplicity and Ease of Administration): Sistem yang kompleks dan sulit dilaksanakan fiskus & WP dapat menghambat kinerja pendapatan APBN, gairah investasi dan kinerja bisnis. Penyederhanaan prosedur perpajakan mengurangi beban administratif bagi wajib pajak, terutama pengusaha UMKM, dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan nasional.
- Transparansi (Transparency): Proses perpajakan yang transparan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan akuntabilitas dalam APBN penerimaan/penggunaan dana pajak untuk pembangunan.
- Efisiensi Ekonomi (Economic Efficiency): Sistem perpajakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menciptakan distorsi mekanisme pasar-bebas cq menghambat aktivitas ekonomi produktif. Pemberian insentif fiskal yang tepat dapat meningkatkan daya-saing bangsa di pasar global.

Pemerintah nan-ideal mendidik WP menjadi warga-negara yang baik cq sadar kewajiban ber bangsa bernegara. Di Indonesia, pemerintah menerapkan sistem pemungutan campuran, namun didominasi oleh *self-assessment system*, dimana wajib pajak menghitung, membayar, dan melapor pajaknya sendiri untuk jenis pajak utama seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sistem bersifat kerakyatan ini, jika diimplementasikan dengan baik, dapat meningkatkan kemandirian WP sebagai WN nan-baik dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, didukung oleh sistem pengawasan/pemeriksaan nan-memadai.

Kombinasi prinsip *official assessment & self assessment* secara tepat untuk pembangunan daya saing bangsa. Reformasi perpajakan yang berkelanjutan menuju sistem terdigitalisasi yang lebih sederhana, adil, bertujuan menciptakan iklim investasi & perekonomian yang lebih kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dimensi utama strategi kebijakan perpajakan yang penting bagi daya-saing bangsa meliputi

- struktur tarif pajak,
- insentif fiskal,
- penyederhanaan administrasi,
- kepastian hukum, dan
- pemanfaatan penerimaan pajak untuk investasi produktif membangun daya-saing.

Berikut adalah rincian dimensi-dimensi tersebut:

- **Jenis & Struktur Tarif Pajak:**
 - a. Tarif pajak yang progresif dan kompetitif membangun daya-pikat PMA, termasuk penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan, dapat menarik investasi domestik dan asing serta mendorong kinerja bisnis.
 - b. Tarif pajak lebih tinggi dibanding negara-lain berisiko menghambat gairah investasi PMA/PMDN.
 - c. Pemerintah nan-bijak & menghormati hukum hak-milik pribadi dan merancang kebijakan PBB dengan pengetahuan memadai bahwa berbagai negara tidak menerapkan PBB atas harta warga-negara milik sendiri (seolah olah membayar sewa atas pemakaian harta pribadi,, yang menyebabkan WN memilih hampiran sewa-properti saja ketimbang memiliki properti ber PBB).
- **Insentif Fiskal:** Pemberian insentif pajak yang terarah kepada daya-saing bangsa cq insentif fiskal untuk mendorong produktivitas bangsa, penggunaan input DN dan peningkatan daya pemasaran ke pasar global.
- **Penyederhanaan Administrasi perpajakan bagi Fiskus dan WP:** Sistem perpajakan nan-ribet & kompleks menjadi penghalang bagi Ditjen Pajak dan WP, reformasi administrasi perpajakan cq menyederhanakan sistem dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan berbasis AI terfokus pada jaminan kepastian kemudahan WP melapor SPT bulanan dan tahunan.

Terdapat Tim Teknis khusus Ditjen Pajak yang bertugas pemastian pelaporan SPT secara gampang nir-hambatan. BPK selalu melakukan audit lapangan untuk memeriksa kelancaran SPT saat puncak cq periode kritis pelaporan SPT.

- **Kepastian Hukum:** Lingkungan perpajakan yang memiliki kepastian hukum yang jelas sangat penting untuk menciptakan iklim perekonomian cq investasi yang kondusif, sebagai misal kementerian keuangan cq Ditjen Pajak nan-arif tetap mengizinkan WP menyeter langsung SPT melalui Kantor-Pos karena NKRI seluas Eropa terdiri atas 17.500 pulau, dan kenyataan-pahit bahwa ternyata masih banyak-masalah malfungsi-sistem untuk pelaporan SPT maya (anehnya) terutama pada periode puncak pelaporan SPT. Investor DN/LN membutuhkan jaminan kepastian mengenai penerapan kebijakan pajak yang konsisten dan adil.
- **Pemanfaatan Penerimaan Pajak (Fungsi Alokasi):** Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara nan-produktif, terutama pembangunan /pemeliharaan infrastruktur, keamanan, pendidikan, dan kesehatan, bukan untuk belanja pegawai dan K/L, sesuai prinsip pajak dari rakyat untuk rakyat.
- **Perluasan Basis Pajak (*Tax Base*):** Memperluas basis pajak (jenis barang dan jasa yang dikenai pajak) secara rasional meningkatkan penerimaan

negara secara berkelanjutan tanpa harus (selalu) menaikkan tarif pajak secara berkala sehingga berdampak menurunkan gairah perekonomian dan daya-saing.

- Pemanfaatan Teknologi: Implementasi teknologi seperti analisis big data dapat meningkatkan efektivitas pemantauan kepatuhan wajib pajak, mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan kepuasan wajib pajak secara keseluruhan.
- *World wide income concept* direalisasi dengan kerja-sama perpajakan dengan negara-negara lain, sampai kerja sama cyber-police untuk penyidikan pajak lintas-negara.,

Kebijakan perpajakan berpotensi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya-saing bangsa.

▪ Sistem APBN

Sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) merupakan jenis sistem APBN yang terfokus pada daya saing bangsa, kinerja APBN terfokus pada efisiensi, efektivitas, dan hasil nyata dari belanja negara.

- Peningkatan menuju optimalisasi Efisiensi dan Efektivitas APBN: Penganggaran berbasis kinerja mengarahkan alokasi dana pada program-program yang memberikan manfaat terbesar bagi bangsa dan sesuai dengan rencana strategis nasional.
- Fokus pada Hasil (Output dan Outcome): Berazas *Value for Money*, sistem ini menekankan pada hasil konkret, seperti peningkatan infrastruktur, mutu pendidikan dan pemerkerjaan (*employment*), produktivitas bangsa, kenaikan PDB dan pendapatan-perkapita.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan tolok-ukur kinerja yang jelas, pemerintah cq tiap K/L lebih mudah mudah menyajikan LKPjPP, sebagai sarana meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Fleksibilitas APBN: Sistem ini memungkinkan pemerintah mengalokasikan kembali anggaran dari program yang tidak efektif ke sektor-sektor prioritas lain yang dapat meningkatkan daya saing pada RAPBN tahun selanjutnya selanjutnya.
- Daya Dukung Fiskal yang Sehat: APBN berorientasi hasil membantu menjaga kesehatan fiskal negara.

Penerapan sistem APBN nan-baik ditambah berbagai reformasi struktura lain cq perubahan jenis & jumlah K/L bertujuan memastikan bahwa APBN berfungsi optimal sebagai motor penggerak pembangunan dan peningkatan daya saing bangsa.

- Sistem valuta bebas dan manajemen kekuatan mata uang domestik
Pilihan jenis sistem valuta bergantung pada struktur dan tujuan ekonomi spesifik negara tersebut, dengan menyadari bahwa masing-masing sistem (tetap, mengambang, dan mengambang terkendali) memiliki kelebihan dan kekurangan dan pengaruh kepada daya saing dengan cara yang berbeda.

- **Sistem Nilai Tukar Mengambang (*Floating Exchange Rate*).**

Pada sistem nilai tukar mengambang adalah nilai mata uang ditentukan sepenuhnya atau sebagian besar oleh kekuatan pasar (penawaran dan permintaan) di pasar valuta asing (forex), bukan ditetapkan oleh pemerintah seperti halnya sistem kurs tetap, yang memberikan fleksibilitas bank sentral untuk menjalankan kebijakan moneter domestik sesuai kondisi ekonomi, geopolitik, dan sentimen pasar.

1. Penawaran dan Permintaan: Jika permintaan mata uang domestik suatu negara tinggi (misalnya karena ekspornya laris), nilainya akan menguat. Sebaliknya, jika permintaan rendah, nilainya melemah.
2. Fleksibilitas Ekonomi: Mata uang yang melemah bisa membuat ekspor lebih murah dan kompetitif, mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Independensi Kebijakan Moneter: Bank sentral berfokus fokus menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi tanpa harus khawatir mempertahankan nilai tukar tertentu, seperti dikutip oleh sumber KiriminAja.

Terdapat beberapa jenis Sistem Nilai-Tukar Mengambang:

- Mengambang Bebas (*Free Floating*): Nilai tukar sepenuhnya diserahkan pada pasar, tanpa intervensi pemerintah.
- Mengambang Terkendali (*Managed Floating*): Pasar tetap menjadi penentu utama, dan bank sentral hanya kalau perlu melakukan intervensi (mis. jual beli mata uang) untuk meredam fluktuasi ekstrem atau menjaga stabilitas, seperti yang dilakukan RRT atau Singapura.

Banyak negara maju dan berkembang nan-berani menghadapi realitas, termasuk Indonesia sejak tahun 1997, menggunakan sistem nilai-tukar mengambang yang berdimensi sbb :

1. Bangsa dihadapkan kepada kenyataan secara *real-time*, birokrasi tiba-masa tiba-akal cq bank sentral nan strategis-responsif dan pede ibarat peselancar (*surfer*) bermain gelombang-laut, selalu mampu mengambil keputusan serta-merta menghadapi perubahan terakhir nan-berbahaya.
2. Daya Saing Ekspor: Dalam sistem ini, nilai tukar ditentukan oleh pasar. Jika mata uang suatu negara terdepresiasi, ekspornya menjadi lebih murah bagi pembeli asing, yang secara otomatis dapat meningkatkan daya saing ekspor.
3. Fleksibilitas Kebijakan Moneter: Bank sentral memiliki kemandirian untuk menerapkan kebijakan moneter (seperti mengontrol inflasi atau menstimulasi pertumbuhan ekonomi) tanpa terikat pada target nilai tukar tertentu.
4. Kelemahan: Fluktuasi nilai tukar yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi dan risiko nilai tukar yang signifikan bagi dunia usaha, terutama di pasar keuangan yang kurang matang.

Pilihan sistem nilai-tukar sbb :

- Sistem Nilai Tukar Tetap (*Fixed Exchange Rate*). Negara mengaku tidak-luwes, pede dan cepat menghadapi dinamika naik-turun nilai-tukar dengan terpaksa mengumumkan adopsi sistem nilai-tukar tetap. Sistem ini mengaitkan nilai mata-uang suatu negara dengan mata-uang utama lainnya (misalnya Dolar AS) atau sekeranjang mata-uang terpilih untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

1. Stabilitas dan Kepastian: Sistem ini memberikan kepastian yang lebih besar bagi bangsa cq bisnis dan investor karena mereka mengetahui dengan pasti nilai tukar mata uang, yang dapat mendorong perdagangan dan investasi jangka panjang.
 2. Pengendalian Inflasi: Sistem ini dapat membantu mengendalikan inflasi karena pemerintah atau bank sentral berkomitmen untuk mempertahankan patokan nilai tukar.
 3. Kelemahan: Negara kehilangan fleksibilitas kebijakan moneter domestik dan harus memiliki cadangan devisa yang besar untuk mengintervensi pasar guna mempertahankan patokan tersebut. Nilai tukar yang terlalu kuat (overvaluasi) dapat merugikan daya saing ekspor bangsa itu.
- Sistem Mengambang Terkendali (Managed Float) adalah sebuah sistem hibrida, menggabungkan berbagai elemen dari kedua sistem di atas. Mata uang pada dasarnya digerakkan oleh pasar, tetapi bank sentral melakukan intervensi sesekali untuk menstabilkan fluktuasi ekstrem.

Manajemen pengendalian nilai tukar yang paling penting bagi daya saing bangsa adalah menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah secara efektif. Stabilitas ini merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang dapat diprediksi, yang secara langsung mendukung daya saing melalui jalur berikut:

- Peningkatan Daya Saing Ekspor: Nilai tukar yang stabil dan kompetitif membantu menjaga harga produk ekspor domestik tetap terjangkau di pasar internasional. Hal ini memungkinkan eksportir untuk merencanakan produksi dan investasi jangka panjang tanpa khawatir tentang fluktuasi mata uang yang tajam.
- Pengendalian Inflasi: Fluktuasi nilai tukar yang berlebihan dapat meningkatkan biaya impor (terutama bahan baku dan barang modal), yang kemudian memicu inflasi di dalam negeri. Stabilitas nilai tukar membantu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil, sehingga daya beli masyarakat terjaga dan biaya produksi domestik lebih terkendali.
- Menarik Investasi Asing: Investor, baik asing maupun domestik, cenderung enggan berinvestasi di negara dengan volatilitas nilai tukar yang tinggi karena risiko imbal hasil di masa depan yang tidak pasti. Nilai tukar yang stabil meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong masuknya Modal Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI), yang krusial untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- Mengurangi Ketidakpastian: Lingkungan nilai tukar yang stabil mengurangi ketidakpastian bagi pelaku bisnis, memfasilitasi pengambilan keputusan terkait perdagangan internasional, penetapan harga, dan manajemen risiko.

Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) berperan-sentral dalam menjaga stabilitas tersebut melalui berbagai instrumen kebijakan moneter, termasuk intervensi di pasar valuta asing, penyesuaian suku bunga (seperti BI Rate), dan pengelolaan cadangan devisa. Kebijakan ini dikoordinasikan dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk memastikan stabilitas makroekonomi yang komprehensif.

- **Manajemen Utang Pemerintah**

Terdapat sejarah berbagai negara pailit/bangkrut karena utang, seperti Sri Lanka, Argentina, Yunani, Venezuela, Lebanon, Islandia, Zimbabwe, dan Ekuador, yang mengalami gagal bayar utang dengan skala besar, memicu krisis ekonomi mendalam seperti hiperinflasi, jatuhnya mata uang, hingga pergantian kepemimpinan.



Contoh Negara yang Mengalami Krisis Utang:

- Sri Lanka (2022): Gagal bayar utang luar negeri US\$ 51 miliar akibat krisis ekonomi parah dan salah urus.
- Lebanon (2020): Gagal bayar utang US\$ 90 miliar (170% dari PDB), salah satu krisis terburuk dalam 150 tahun terakhir menurut Bank Dunia.
- Islandia (2008): Bangkrut setelah utang negara mencapai 10 kali lipat PDB, terkait krisis keuangan global.
- Argentina (2001 & 2014): Mengalami gagal bayar utang besar-besaran karena kebijakan yang tidak sehat dan utang yang tidak terkendali.
- Yunani (2012-2015): Krisis utang Eropa yang parah, membutuhkan bantuan internasional.
- Venezuela (2017): Mengalami krisis ekonomi dan gagal bayar utang karena kejatuhan harga minyak dan salah kelola.
- Zimbabwe (2008): Menghadapi hiperinflasi ekstrem dan krisis utang.
- Ekuador (2008): Gagal bayar utang karena ketergantungan pada minyak dan defisit fiskal.
- Rusia (1998): Mengalami krisis rubel dan gagal bayar utang.
- Meksiko (1982): Mengalami krisis utang yang mempengaruhi seluruh Amerika Latin.

Penyebab Umum:

- Utang Berlebihan: Peningkatan utang publik dan swasta yang tidak terkendali.
- Salah Urus Fiskal: Defisit anggaran dan kebijakan ekonomi yang tidak berkelanjutan.
- Ketergantungan Komoditas: Kejatuhan harga komoditas seperti minyak.
- Korupsi dan Ketidakstabilan Politik: Memperburuk kondisi ekonomi.
- Krisis Global: Seperti krisis keuangan 2008 dan pandemi.

Beberapa negara seperti Sri Lanka, Lebanon, Argentina, dan Venezuela mengalami kebangkrutan resmi atau default, sementara negara lain seperti Islandia dan Ekuador berhasil melakukan restrukturisasi utang dan bangkit kembali meskipun menghadapi kesulitan berat.

Pada tataran hukum internasional, suatu negara berdaulat tidak dapat dinyatakan "pailit" dalam artian yang sama seperti individu atau perusahaan, karena tidak ada badan hukum internasional yang memiliki wewenang untuk menyita aset atau membubarkan pemerintahannya. Sebaliknya, yang terjadi adalah "gagal bayar utang berdaulat" (*sovereign default*) yang

memicu serangkaian konsekuensi ekonomi dan politik yang parah, bukan hukuman pidana.

Konsekuensi dan sanksi yang dihadapi negara yang mengalami gagal bayar utang meliputi:

Konsekuensi Ekonomi bagi Negara Bangkrut

- Penurunan Peringkat Kredit Drastis: Lembaga pemeringkat utang internasional (seperti Standard & Poor's, Moody's, Fitch) akan menurunkan peringkat kredit negara tersebut ke level terendah, sering kali menjadi "junk" atau *default*.
- Akses Pasar Keuangan Terputus: Negara tersebut akan kesulitan atau bahkan mustahil meminjam uang di pasar keuangan internasional lagi. Jika ada yang bersedia meminjamkan, suku bunga yang dikenakan akan sangat tinggi, mencerminkan risiko yang sangat besar.
- Krisis Ekonomi Internal: Gagal bayar sering kali memicu krisis ekonomi yang lebih luas di dalam negeri, termasuk inflasi yang sangat tinggi (*hiperinflasi*), jatuhnya nilai mata uang lokal, dan kekacauan pasar keuangan.
- Penyitaan Aset Luar Negeri (Kasus Tertentu): Meskipun kedaulatan mencegah penyitaan aset di dalam negeri, kreditur swasta dapat mencoba jalur hukum di pengadilan internasional untuk menyita aset negara di luar negeri (misalnya, rekening bank sentral di luar negeri, atau aset milik perusahaan negara).

Sanksi Politik dan Kelembagaan bagi Negara Bangkrut

- Negosiasi Ulang Utang: Negara yang gagal bayar terpaksa memasuki meja perundingan dengan para kreditur (baik negara lain, bank swasta, atau lembaga internasional) untuk merestrukturisasi utang. Proses ini biasanya dimediasi oleh lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF) atau Bank Dunia.
- Intervensi Kebijakan (Syarat Pinjaman): Untuk mendapatkan pinjaman talangan (*bailout*) dari IMF atau Bank Dunia, negara tersebut harus menyetujui syarat-syarat tertentu yang sering kali sangat ketat (seperti pemotongan anggaran belanja publik, privatisasi aset negara, atau reformasi ekonomi radikal), yang dapat menimbulkan gejolak sosial dan politik di dalam negeri.
- Kehilangan Kepercayaan Internasional: Negara tersebut akan kehilangan kredibilitas dan kepercayaan dari komunitas global, investor, dan mitra dagang, yang berdampak jangka panjang pada hubungan diplomatik dan ekonomi.

- **Manajemern Arus-Kas Negara.**

Prinsip ideal pengelolaan arus kas keuangan negara melibatkan beberapa pilar utama untuk memastikan stabilitas, efisiensi, dan transparansi fiskal.

Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

1. Perencanaan dan Penganggaran yang Akurat:

- Membuat proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang realistis dan kredibel untuk jangka pendek (mingguan/bulanan) dan jangka panjang (tahunan/multitahunan).

- Mengintegrasikan perencanaan kas dengan siklus anggaran tahunan.
- 2. Manajemen Rekening Tunggal (Treasury Single Account - TSA):
 - Mengonsolidasikan seluruh dana pemerintah ke dalam satu rekening utama (atau sekelompok rekening yang saling terhubung erat) di bank sentral.
 - Hal ini memaksimalkan visibilitas kas, memfasilitasi *netting* otomatis saldo debit/kredit, dan meminimalkan saldo kas menganggur yang tidak menghasilkan bunga.
- 3. Optimalisasi Investasi Kas Jangka Pendek:
 - Menginvestasikan saldo kas surplus secara hati-hati dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid (seperti obligasi pemerintah jangka pendek atau deposito berjangka) untuk memperoleh pendapatan bunga, tanpa mengorbankan ketersediaan kas saat dibutuhkan.
- 4. Penjaminan Likuiditas yang Cukup:
 - Memastikan selalu tersedia kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pemerintah secara tepat waktu (gaji PNS, pembayaran utang, belanja operasional).
 - Memiliki akses ke fasilitas pinjaman darurat atau pasar uang jangka pendek jika terjadi kekurangan kas yang tidak terduga.
- 5. Pengelolaan Utang yang Efisien:
 - Mengkoordinasikan manajemen arus kas dengan strategi penerbitan utang untuk meminimalkan biaya pinjaman (bunga) dan mengelola profil risiko utang negara secara keseluruhan.
- 6. Transparansi dan Akuntabilitas:
 - Melaporkan posisi kas secara reguler dan akurat kepada pihak-pihak terkait (Kementerian Keuangan, bank sentral, parlemen, dan publik).
 - Memiliki kerangka hukum dan peraturan yang jelas yang mendasari semua transaksi manajemen kas.
- 7. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terpusat:
 - Menggunakan sistem TI modern untuk melacak, memantau, dan melaporkan semua transaksi keuangan pemerintah secara *real-time* atau mendekati *real-time*.

Prinsip-prinsip ini tersebut di atas membantu pemerintah mengelola dananya secara efektif, mengurangi biaya transaksi, meningkatkan pendapatan non-pajak, dan memperkuat disiplin fiskal secara keseluruhan

- **Prinsip manajemen utang negara yang baik (*good debt management*).**

Prinsip manajemen utang negara yang baik meliputi

- pengelolaan risiko yang hati-hati,
- penggunaan utang untuk investasi produktif,
- diversifikasi sumber pembiayaan non-utang,
- transparansi dan akuntabilitas, serta
- konsistensi dengan kebijakan fiskal dan moneter nan prudent.

Tujuan utama manajemen utang negara non-konservatif adalah memastikan keberlanjutan fiskal dan ekonomi jangka-panjang dengan menjaga utang dalam batas aman-terkendali, tidak membebani kabinet mendatang.

Prinsip-prinsip utama sbb :



- **Kehati-hatian dan manajemen risiko:** Pemerintah harus mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan utang, seperti risiko suku bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali (refinancing). Ini penting untuk meminimalkan kerentanan fiskal.
- **Investasi produktif:** Utang sebaiknya digunakan untuk membiayai investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- **Diversifikasi sumber pembiayaan:** Memperluas sumber pembiayaan membantu mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber atau jenis utang.
- **Transparansi dan akuntabilitas:** Pengelolaan utang yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan investor.
- **Kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana:** Pengelolaan utang harus sejalan dengan kebijakan fiskal (pajak dan belanja) dan moneter (suku bunga, nilai tukar) untuk menjaga stabilitas ekonomi. Suku bunga yang rendah, misalnya, akan meringankan beban pembayaran utang.
- **Strategi jangka panjang:** Mengembangkan strategi utang (seperti *Medium Term Debt Strategy*) yang memberikan panduan selama 3-5 tahun ke depan penting untuk menyeimbangkan antara biaya dan risiko.
- **Prinsip mengelola *Debt Service Ratio* (DSR).**

Prinsip utama dalam mengelola *Debt Service Ratio* (DSR) atau Rasio Layanan Utang pemerintahan adalah *keberlanjutan fiskal dan prinsip kehati-hatian (prudent)* untuk memastikan kemampuan membayar kewajiban utang tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.

Berikut adalah prinsip-prinsip mengelola DSR pemerintahan :

- a. **Keberlanjutan Utang (Fiscal Sustainability).** Inti dari pengelolaan utang publik adalah memastikan bahwa utang dan kenaikannya tetap berada dalam batas yang terkendali relatif terhadap produksi (PDB) dan potensi pendapatan perekonomian dalam jangka panjang, bertujuan agar pemerintah dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang di masa depan nan segera dan jangka-panjang tanpa memerlukan penyesuaian fiskal yang drastis atau merugikan.
- b. **Kepatuhan terhadap Batas Aman (Prudential Limits).** Pemerintah perlu menetapkan dan mematuhi batas aman untuk rasio utangnya. Di Indonesia, misalnya, rasio utang terhadap PDB dijaga di bawah ambang batas aman 60% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, meskipun DSR terhadap pendapatan mungkin memiliki ambang batas yang

- berbeda (rekomendasi IMF biasanya sekitar 25-35%). Menjaga kondisi utang dalam batas yang disepakati dengan DPR adalah amat penting.
- c. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Pengelolaan keuangan negara, termasuk utang, harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Pemerintah wajib melaporkan posisi kumulatif utang dan kewajiban pinjaman secara berkala kepada publik cq DPR/D, memungkinkan pengawasan publik dan memastikan dana utang digunakan sebagaimana mestinya.
 - d. **Penggunaan Utang untuk Aktivitas Produktif.** Utang harus dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan berdampak-ganda (*multiplier effect*) cq meningkatkan kapasitas perekonomian cq menghasilkan peningkatan kemakmuran di masa depan.
 - e. **Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana**
DPR cq BPK dan Pemerintah memastikan efektivitas & efisiensi penggunaan dana yang diperoleh dari utang.
 - f. **Diversifikasi Sumber Pembiayaan.** Mengurangi ketergantungan pada satu sumber/modus pinjaman dengan mendiversifikasi sumber pembiayaan bersumber non-utang.
 - g. **DSR dijaga pada level yang sehat, memastikan kepercayaan investor, dan mempromosikan stabilitas ekonomi jangka panjang.**

- **Prinsip pengelolaan Surat Utang Negara (SUN).**

Prinsip pengelolaan Surat Utang Negara (SUN) yang ideal didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudent*), transparansi, **dan** keberlanjutan fiskal, dengan tujuan meminimalisir biaya dan risiko untuk mendukung pembangunan nasional.

Prinsip-prinsip utama tersebut meliputi:

- **Kehati-hatian (Prudentiality):** Pengelolaan utang wajib dilakukan secara hati-hati, terukur, dan profesional. Hal ini termasuk memastikan utang tetap dalam batas aman dan tidak membebani perekonomian di masa depan.
- **Keberlanjutan Fiskal (Debt Sustainability):** Pemerintah harus memastikan bahwa utang publik, baik jumlah total maupun kenaikannya, tetap terkendali relatif terhadap kemampuan perekonomian untuk menghasilkan pendapatan (PDB dan penerimaan negara) dalam jangka panjang.
- **Minimalisasi Biaya-Utang dan Risiko-Gagal-Bayar,** dengan mencapai keseimbangan antara biaya pembiayaan nan-rendah (melalui suku bunga kompetitif) dan risiko terkendali, seperti risiko likuiditas (jadwal pembayaran utang disesuaikan dengan kondisi kas & arus kas) dan risiko gagal *refinancing* (mengelola /memperpanjang durasi jatuh tempo utang).
- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Seluruh proses pengelolaan utang, dari perencanaan, penerbitan, penggunaan, hingga pembayaran, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan. Data utang dan laporan manajemen utang selalu di kawal BPKP & BPK, dipublikasikan secara berkala.

- Diversifikasi Sumber Pembiayaan: Memperluas basis investor dan instrumen utang (misalnya, menerbitkan obligasi ritel, obligasi syariah/sukuk) untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pembiayaan dan memanfaatkan momentum pasar yang optimal.
- Penggunaan untuk Investasi Produktif: Dana hasil penerbitan SUN sebaiknya digunakan untuk membiayai kegiatan produktif atau investasi yang dapat meningkatkan kapasitas perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata untuk pengeluaran konsumtif.
- Pengembangan Pasar Domestik: Fokus pada pengembangan pasar SUN domestik yang efisien dan likuid untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak pasar keuangan global.
- Kerangka Kebijakan yang Jelas: Memiliki strategi dan kebijakan pengelolaan utang jangka menengah yang terencana, dievaluasi secara berkala, dan didukung oleh kerangka hukum yang kuat, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara di Indonesia.

- **Manajemen Utang Negara Jatuh Tempo**

Prinsip ideal dalam mengelola pembayaran kewajiban jatuh tempo negara mencakupi manajemen risiko nan-prudent, transparansi, dan koordinasi - efektif antara kebijakan fiskal dan moneter, bertujuan memastikan ketersediaan dana untuk memelihara kemampuan membayar kewajiban secara tepat waktu dengan biaya serendah mungkin dalam jangka panjang, tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.

Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam mengelola kewajiban jatuh tempo negara secara ideal:

- a. Perencanaan Strategis Jangka Panjang dan Menengah. Pengelolaan utang yang efektif memerlukan strategi utang jangka menengah (Medium-Term Debt Strategy/MTDS) yang jelas dan terencana, biasanya untuk periode 3-5 tahun, yang dievaluasi secara berkala. Strategi ini berfungsi sebagai panduan umum bagi unit pengelola utang.
- b. Meminimalkan Biaya dengan Mempertimbangkan Risiko. Tujuan utama adalah meminjam dana pada biaya serendah mungkin secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga tingkat risiko yang dapat diterima. Fokusnya bukan hanya pada biaya terendah saat ini, tetapi juga mitigasi risiko yang mungkin timbul di masa depan, seperti risiko pembiayaan kembali (risiko *refinancing*), risiko pasar (bunga dan nilai tukar), dan risiko likuiditas.
- c. Manajemen Risiko Likuiditas dan *Refinancing*
 - Diversifikasi instrumen dan investor: Pemerintah harus mendiversifikasi sumber pembiayaan (misalnya, utang domestik dan asing, berbagai jenis instrumen) serta jenis investor untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan tertentu.
 - Pengelolaan profil jatuh tempo: Pemerintah secara aktif mengelola profil jatuh tempo eratis agar tidak menumpuk dalam satu periode tertentu (*maturity hump*), yang dapat menyebabkan tekanan likuiditas signifikan.

- Penyediaan penyangga kas (*cash buffer*) memadai: Negara harus menjaga cadangan kas yang memadai untuk menutupi pengeluaran saat ini dan yang akan datang tanpa harus meminjam ke pihak ketiga secara mendadak dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan.
- Transparansi dan Akuntabilitas. Proses pengelolaan utang harus transparan dan akuntabel, memberikan keyakinan kepada semua pihak yang berkepentingan bahwa utang dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Hal ini membangun kepercayaan investor dan pasar.
- Koordinasi manajemen utang & arus-kas dengan Kebijakan Fiskal/APBN/D, Kebijakan Makroekonomi, Mikroekonomi dan Moneter. Manajemen utang harus dikoordinasikan secara efektif dengan kebijakan fiskal (pengeluaran dan pendapatan negara) dan moneter (kebijakan suku bunga dan nilai tukar oleh Bank Sentral) untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
- Pengembangan Pasar Domestik. Mengembangkan pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang dalam, aktif, dan likuid membantu mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang sering kali membawa risiko nilai tukar lebih tinggi. Pengembangan pasar SBN dilakukan secara berhati-hati cq selektif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, suatu negara dapat memastikan kewajiban utangnya tetap dalam batas aman dan berkelanjutan, serta berfungsi sebagai instrumen pendukung pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Informasi lebih lanjut mengenai strategi pengelolaan utang Indonesia dapat dilihat melalui sumber daya dari Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Rapat kabinet paripurna membahas risiko gagal bayar utang negara, ketika pemerintah kemungkinan-besar tidak mampu membayar utang (pokok dan bunga) karena masalah ekonomi yang buruk, utang yang menumpuk, ketidakstabilan politik, dan pengeluaran yang berlebihan. Faktor penyebab utama mungkin sbb :

- Kinerja kabinet dan/atau ekonomi yang buruk: Stagnasi atau resesi ekonomi karena kebijakan semena-mena & tidak pro-pasar, sehingga melemahkan kemampuan-negara untuk membayar utang dan menghadapi risiko gaga-bayar(default).
- Belanja non-produktif dan selera-berutang menyebabkan beban-utang yang tinggi: Utang juga dapat menumpuk takterkendali akibat biaya perang, salah urus, korupsi, atau kemerosotan ekonomi jangka panjang menjadi penyebab utama.
- Instabilitas-politik: Blunder kebijakan politik atau salah urus keuangan sering kali menjadi katalisator gagal bayar.
- Pengeluaran konsumtif APBN berlebihan.
- Risiko rollover: Risiko bahwa negara tidak dapat meminjam kembali utang yang jatuh tempo (*roll-over*) karena tidak ada investor yang mau membeli obligasi negara.

- Pendapatan negara nan lemah: Pendapatan negara, misalnya pajak dan hasil tambang yang tidak mencukupi untuk membayar utang dapat memicu gagal bayar.

Konsekuensi gagal bayar utang negara

- Kehilangan akses ke modal: Setelah gagal bayar, negara akan sulit untuk mendapatkan pinjaman baru dari pasar keuangan internasional di masa mendatang.
- Peringkat kredit yang rendah: Lembaga pemeringkat kredit akan menurunkan peringkat kredit cq daya-pinjam negara tersebut, yang membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal.
- Gagal bayar menyebabkan kehilangan kepercayaan investor: Kepercayaan investor baik domestik maupun asing terhadap kabinet bercitra-buruk akan menurun drastis.
- Gagal bayar menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi: Gagal bayar dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat investasi dari luar negeri.

- **Manajemen Anti-Kebangkrutan Negara**

Pernyataan bahwa suatu negara atau pemerintahnya "bangkrut" sering digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk menggambarkan krisis keuangan negara nan-parah cq tak mampu membayar kewajiban jatuh-tempo.

Berikut adalah kondisi yang mengindikasikan hal tersebut:

1. Gagal Bayar Utang (Sovereign Default), terjadi ketika pemerintah tidak mampu membayar kembali utang pokok atau bunga pinjaman pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Ini bisa berlaku untuk pinjaman domestik atau luar negeri (asing).
2. Ketidakmampuan Mengumpulkan Pendapatan: Negara tidak dapat lagi mengumpulkan pendapatan pajak dan industri ekstraktif nan-cukup untuk menutupi pengeluaran operasional dasar, seperti gaji pegawai negeri, pensiun, dan layanan publik esensial.
3. Akses Terputus ke Pasar Keuangan: Ketika risiko gagal-bayar meningkat, investor /lembaga pembiayaan tidak lagi bersedia meminjamkan uang kepada pemerintah, atau hanya mau meminjamkan dengan suku bunga yang sangat tinggi, membuat pembiayaan baru menjadi tidak mungkin.
4. Krisis Moneter dan Hiperinflasi: Sering kali krisis fiskal disertai dengan penurunan-nilai mata-uang domestik dan hiperinflasi, mengikis daya beli warga negara/bangsa dan mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Pada tataran konseptual :

- Suatu negara secara teknis tidak dapat mengajukan "kebangkrutan" di pengadilan internasional dengan cara yang sama seperti perusahaan swasta. Namun, dalam kasus krisis parah, negara dapat bernegosiasi ulang (restrukturisasi) utangnya dengan kreditornya, sering kali dengan bantuan organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menstabilkan kembali keuangan dan ekonomi mereka.

- Tidak ada satu pun sistem keuangan yang dapat menjamin negara dari risiko kebangkrutan, karena setiap sistem terbuka terhadap risiko dan guncangan global.
- Stabilitas sistem keuangan dapat dijaga dalam batas-tertentu melalui kombinasi kebijakan yang matang dan tata kelola yang baik. Elemen-elemen kunci untuk menciptakan sistem keuangan yang tangguh terhadap krisis meliputi:
 - Pengelolaan Fiskal yang Pruden
 - Kebijakan Moneter yang Efektif
 - Bank Sentral Independen: Memiliki bank sentral yang kuat dan independen (seperti Bank Indonesia) yang fokus pada stabilitas moneter dan menjaga inflasi tetap terkendali, tidak di dikte birokrasi.
 - Sistem Nilai Tukar yang Fleksibel: Sistem nilai tukar mengambang, yang memungkinkan mata uang berfluktuasi sesuai kondisi pasar, dapat membantu menyerap guncangan eksternal.
- **Pengawasan dan Regulasi Sektor Keuangan yang Kuat**
 - Lembaga Pengawas: Keberadaan lembaga pengawas yang efektif seperti BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sangat krusial. Mereka memastikan lembaga keuangan individu sehat dan menjalankan fungsi intermediasi secara memadai.
 - Jaring Pengaman Keuangan: Memiliki jaring pengaman keuangan (*financial safety net*) yang berfungsi dengan baik, termasuk penjaminan simpanan, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan.
- **Faktor Eksternal dan Tata Kelola**
 - a. Lingkungan Ekonomi Makro Stabil: Menciptakan lingkungan ekonomi makro yang stabil adalah fondasi utama.
 - b. Transparansi dan Tata Kelola yang Baik: Tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas membantu membangun kepercayaan investor dan masyarakat, serta mengurangi korupsi yang dapat merusak keuangan negara.
 - c. Sebagai contoh, negara-negara seperti Swiss dikenal memiliki stabilitas ekonomi yang tinggi, ditopang oleh kombinasi faktor-faktor ini. Indonesia sendiri dinilai sebagai salah satu ekonomi yang tangguh dan resilien pasca krisis 1997/1998 berkat reformasi kebijakan fiskal dan penguatan pengawasan.

Sebagai ringkasan,

1. komponen makroekonomi yang paling penting bagi daya saing bangsa adalah produktivitas bangsa cq efektivitas / efisiensi suatu negara dalam menggunakan sumber daya yang tersedia (tenaga kerja, modal, dan bahan baku) untuk menghasilkan barang dan jasa secara optimal secara cerdas dan bersih (clean) mungkin bersyarat inflasi yang rendah, stabilitas fiskal, dan lingkungan peraturan yang kondusif juga sangat penting, birokrasi bersih KKN.

2. Komponen ekonomi mikro terpenting bagi daya saing bangsa berakar pada tingkat **perusahaan, industri, dan pasar tertentu**, yang secara kolektif menentukan cara sumber daya dialokasikan secara efisien dan produktivitas ditingkatkan.
3. Menurut teori ekonomi, terutama yang dikembangkan oleh Michael Porter, daya saing bangsa bukan hanya diwariskan (sumber daya alam), tetapi diciptakan melalui faktor-faktor mikroekonomi, yang paling utama meliputi:
 - a. **Strategi, Struktur, dan Persaingan Perusahaan:** Cara perusahaan diorganisir, dikelola, dan tingkat persaingan di pasar domestik sangat memengaruhi dorongan mereka untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi. Persaingan internal yang sehat memaksa perusahaan untuk terus unggul.
 - b. **Kondisi Faktor (Input Spesialisasi):** Ketersediaan dan kualitas input produksi yang terspesialisasi, seperti tenaga kerja terampil, infrastruktur spesifik (transportasi, energi, telekomunikasi), dan modal, sangat krusial. Faktor-faktor ini harus dikembangkan secara internal, tidak hanya bergantung pada sumber daya alam.
 - c. **Kondisi Permintaan:** Adanya permintaan domestik yang canggih dan menuntut akan produk dan layanan berkualitas tinggi mendorong perusahaan untuk berinovasi dan meningkatkan standar, yang pada akhirnya mempersiapkan mereka untuk pasar global.
 - d. **Industri Pendukung dan Terkait (Kluster Industri):** Kehadiran kluster industri yang kuat—jaringan pemasok, produsen, dan institusi terkait yang saling mendukung dan berinteraksi dalam satu lokasi geografis—menciptakan efisiensi, memfasilitasi transfer pengetahuan, dan mendorong inovasi kolektif.
 - e. **Inovasi dan Produktivitas:** Kemampuan perusahaan dan industri untuk terus berinovasi (baik dalam produk maupun proses) dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta modal adalah inti dari daya saing jangka panjang.

Secara ringkas, **inovasi, produktivitas, dan pembentukan kluster industri yang efisien** adalah komponen mikroekonomi terpenting karena secara langsung memengaruhi kemampuan suatu bangsa untuk menghasilkan barang dan jasa bernilai tinggi yang kompetitif di pasar global.

Optimalisasi kondisi moneter suatu bangsa melibatkan serangkaian kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral dan pemerintah untuk mengelola jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar mata uang, yang secara langsung memengaruhi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan [1].

Berikut adalah langkah-langkah utama dan optimalisasi dalam mengelola kondisi moneter:

1. Kebijakan Moneter (Otoritas Bank Sentral)

Sebagai contoh, Bank sentral (seperti Bank Indonesia atau The Fed di AS) memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas moneter melalui instrumen-instrumen berikut:

- **Mengendalikan Inflasi:** Tujuan utama kebijakan moneter yang optimal adalah menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil. Ini memberikan kepastian bagi investor dan konsumen. Bank sentral secara transparan mengomunikasikan target inflasi dan bertindak tegas (misalnya, menaikkan suku bunga) saat tekanan harga meningkat.
- **Suku Bunga Acuan (BI-Rate di Indonesia):** Menyesuaikan suku bunga acuan adalah alat paling ampuh. Suku bunga dinaikkan untuk mendinginkan ekonomi

yang terlalu panas (mengurangi inflasi) dan diturunkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi saat lesu (meningkatkan pinjaman dan investasi). Penyesuaian harus tepat waktu dan bertahap.

- **Operasi Pasar Terbuka (OPT):** Membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk menambah atau mengurangi likuiditas (jumlah uang beredar) di pasar. Melakukan intervensi secara terencana untuk memastikan ketersediaan dana jangka pendek di sistem perbankan tetap stabil.
- **Mengatur Nilai Tukar (Kurs):** Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang domestik. Fokus pada stabilitas yang wajar, bukan mempertahankan nilai tukar pada level tertentu secara kaku, untuk menyerap guncangan eksternal dan menjaga daya saing ekspor.

2. Koordinasi Kebijakan Fiskal (Pemerintah)

Kebijakan moneter tidak dapat berjalan sendiri. Optimalisasi terjadi ketika ada sinkronisasi dengan kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah dan pajak) oleh Kabinet.

- **Sinergi Moneter dan Fiskal:** Jika pemerintah berhemat (kebijakan fiskal ketat) saat bank sentral menaikkan suku bunga (kebijakan moneter ketat), upaya untuk mengendalikan inflasi akan lebih efektif. Memastikan pengeluaran pemerintah bersifat produktif (infrastruktur, pendidikan) yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, bukan sekadar konsumsi jangka pendek yang bisa memicu inflasi.

3. Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Kondisi moneter yang optimal membutuhkan sistem perbankan dan keuangan yang sehat.

- **Pengawasan Perbankan:** Memastikan bank memiliki modal yang cukup dan mengelola risiko dengan baik untuk mencegah krisis keuangan [1].
 - **Optimalisasi:** Menggunakan kerangka regulasi yang kuat (misalnya, standar Basel) dan melakukan uji stres secara berkala.
- **Literasi Keuangan:** Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik, yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Secara ringkas, optimalisasi kondisi moneter bangsa dicapai melalui **independensi bank sentral** dalam menetapkan kebijakan suku bunga berbasis data, **koordinasi yang erat** dengan pemerintah, dan **fokus pada stabilitas harga** sebagai prioritas utama.

- Eksplorasi Kualitatif tentang Tindakan Antisipatif Pemerintah dalam Menghadapi Krisis Ekonomi: Kasus Kebijakan Moneter dan Fiska

Dalam optimalisasi produktivitas bangsa, Kabinert memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa cara utama untuk mencapainya:

1. Investasi dalam Sumber Daya Manusia (SDM):

- **Pendidikan Berkualitas:** Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua tingkatan, fokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan (seperti literasi digital, STEM, dan keterampilan lunak).
- **Kesehatan dan Gizi:** Memastikan akses layanan kesehatan yang baik dan perbaikan gizi masyarakat sejak dini, karena SDM yang sehat dan bergizi baik lebih produktif.

- **Pelatihan Vokasi dan Keterampilan Kembali:** Menyediakan program pelatihan keterampilan dan pelatihan kembali (reskilling/upskilling) yang responsif terhadap perubahan teknologi dan ekonomi, memfasilitasi adaptasi angkatan kerja terhadap industri 4.0.
2. **Peningkatan Infrastruktur:**
 - **Fisik:** Membangun dan memelihara infrastruktur bangsa, terutama transportasi, energi, dan logistik yang efisien untuk mengurangi biaya dan waktu pergerakan barang dan jasa.
 - **Digital:** Memperluas akses internet berkecepatan tinggi yang terjangkau ke seluruh pelosok negeri untuk mendukung ekonomi digital dan pendidikan jarak jauh.
 3. **Reformasi Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan:**
 - **Penyederhanaan Regulasi:** Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menyederhanakan birokrasi, mengurangi perizinan yang berbelit, dan memastikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha.
 - **Pemberantasan Korupsi:** Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah untuk memastikan alokasi sumber daya publik yang optimal dan efisien.
 - **Stabilitas Ekonomi Makro:** Menjaga inflasi tetap rendah, mengelola utang negara secara prudent, dan menciptakan stabilitas ekonomi untuk mendorong investasi jangka panjang.
 4. **Penerapan Teknologi dan Inovasi:**
 - **Riset dan Pengembangan (R&D):** Mendorong investasi di bidang R&D, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, untuk menghasilkan inovasi baru yang meningkatkan efisiensi.
 - **Adopsi Teknologi:** Memfasilitasi UMKM dan berbagai jenis industri dalam mengadopsi teknologi digital dan otomatisasi untuk meningkatkan skala produksi dan efisiensi operasional.
 5. **Peningkatan Produktivitas Sektoral:**
 - **Pertanian:** Menerapkan teknologi pertanian modern, sistem irigasi yang efisien, dan praktik terbaik untuk meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan petani.
 - **Manufaktur:** Mendorong investasi dalam teknologi canggih dan otomatisasi untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur global .

Melalui kombinasi upaya-upaya ini, sebuah bangsa dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mencapai *full employment* (kesempatan kerja penuh) di suatu bangsa, diperlukan kombinasi strategi yang berfokus pada peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, dukungan untuk UMKM, dan kebijakan makroekonomi yang mendukung. Langkah-langkah ini harus saling terintegrasi untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memastikan adanya permintaan yang cukup untuk produk dan jasa.

Kebijakan makroekonomi dan investasi

- **Dorong investasi:** Pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dalam dan luar negeri yang bisa membuka lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan bisnis.
- **Bangun infrastruktur:** Pembangunan infrastruktur yang masif akan menciptakan lapangan kerja secara langsung dan juga mendorong aktivitas ekonomi sektor lain.
- **Gunakan kebijakan fiskal dan moneter:** Pertahankan tingkat permintaan agregat yang cukup dengan menggunakan instrumen fiskal dan moneter yang tepat.
- **Tingkatkan perdagangan:** Mendorong perdagangan internasional dapat menciptakan lebih banyak permintaan untuk barang dan jasa, yang secara langsung berdampak pada peningkatan lapangan kerja.

Pengembangan sumber daya manusia

- **Perbaiki pendidikan dan pelatihan:** Selaraskan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja melalui pelatihan keterampilan dan program magang yang relevan.
- **Beri akses ke informasi pasar kerja:** Permudah akses informasi lowongan kerja melalui *job fair* atau platform digital.
- **Tingkatkan kualitas pekerjaan:** Upayakan agar pekerjaan yang tercipta berkualitas, dengan gaji yang sesuai, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman.
- **Fokus pada kelompok rentan:** Beri perhatian khusus pada kelompok yang rentan di diskriminasi atau memiliki hambatan untuk masuk ke pasar kerja.

Dukungan untuk wirausaha dan sektor lain

- **Dukung UMKM:** Berikan dukungan yang lebih besar kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, dan akses pasar.
- **Kembangkan sektor kreatif dan digital:** Berinvestasi pada sektor ekonomi kreatif dan digital dapat membuka peluang kerja baru yang inovatif.
- **Perkuat sektor pertanian dan perikanan:** Dukungan dapat diberikan melalui teknologi, praktik terbaik, dan peningkatan produktivitas di sektor-sektor ini.

Reformasi dan inovasi



- **Tingkatkan jaminan sosial:** Perkuat sistem jaminan sosial bagi pekerja untuk memberikan perlindungan yang lebih baik.
- **Reduksi jam kerja:** Pertimbangkan pengurangan jam kerja tanpa kehilangan □ pendapatan secara drastis untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja.
- **Ciptakan lapangan kerja hijau:** Investasi pada ekonomi hijau dapat menciptakan pekerjaan baru yang juga mendukung keberlanjutan lingkungan.
- **Strategi Bangsa Memerangi Pengangguran**
Menghapus pengangguran sepenuhnya adalah target yang sangat ambisius, tetapi suatu bangsa dapat secara signifikan menguranginya melalui kombinasi kebijakan ekonomi makro yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan dukungan kuat untuk penciptaan lapangan kerja.

Berikut adalah langkah-langkah kunci yang dapat diterapkan:

1. Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal

Pemerintah berperan sentral dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja.

- **Peningkatan Investasi:** Mendorong investasi, baik asing maupun domestik, di sektor-sektor padat karya dapat membuka banyak lapangan kerja baru.
- **Pembangunan Infrastruktur:** Proyek pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan) secara langsung menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan sekaligus memperbaiki konektivitas ekonomi, yang mendukung pertumbuhan sektor lain.
- **Insentif Fiskal:** Mengurangi pajak atau memberikan subsidi bagi perusahaan yang merekrut karyawan baru atau melakukan ekspansi bisnis dapat mendorong pertumbuhan lapangan kerja.
- **Kebijakan Moneter Akomodatif:** Bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mengurangi biaya pinjaman bagi bisnis, merangsang investasi, dan konsumsi.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Memastikan angkatan kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan sangat penting.

- **Revitalisasi Pendidikan Vokasi:** Menguatkan pendidikan dan pelatihan vokasi (kejuruan) untuk menghasilkan lulusan siap kerja dengan keterampilan praktis yang sesuai dengan permintaan industri.
- **Program Pelatihan Keterampilan:** Pemerintah dapat menyelenggarakan program pelatihan seperti Program Kartu Prakerja di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja, termasuk pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling).
- **Pemerataan Akses Pendidikan:** Memastikan akses pendidikan berkualitas merata di seluruh daerah untuk mengurangi kesenjangan keterampilan.

3. Dukungan untuk Kewirausahaan dan UMKM

Budaya wirausaha dibangun dan menjadi mata-ajar /kurikulum resmi sejak sekolah-dasar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung ekonomi dan pencipta lapangan kerja yang signifikan.

- **Akses Permodalan:** Mempermudah UMKM mendapatkan akses pinjaman modal usaha dengan bunga rendah untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan bisnis.
- **Pelatihan Bisnis dan Teknologi:** Memberikan pelatihan manajemen bisnis, pemasaran digital, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing UMKM.
- **Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif:** Mendukung startup dan sektor ekonomi kreatif untuk mendorong penciptaan lapangan kerja di era digital.

4. Optimalisasi Informasi Pasar Kerja

Mempercepat pertemuan antara pencari kerja dan lowongan yang tersedia (mengatasi pengangguran friksional). Pembangunan budaya-baru, pencari kerja harus mampu menjadi wirausahawan.

- **Platform Informasi Kerja:** Mengembangkan dan mengoptimalkan platform digital untuk menyebarkan informasi lowongan pekerjaan secara luas dan efisien.
- **Layanan Ketenagakerjaan:** Memperkuat peran dinas ketenagakerjaan dan bursa kerja untuk mempertemukan perusahaan dengan calon pekerja yang memenuhi kualifikasi.

Optimalisasi Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita melibatkan peningkatan PDB keseluruhan lebih cepat daripada pertumbuhan populasi. Hal ini memerlukan pendekatan multifaset yang fokus pada peningkatan produktivitas, pembangunan sumber daya manusia, dan penciptaan lingkungan ekonomi yang kondusif.

- **Strategi Optimalisasi PDB**

Berikut adalah beberapa strategi utama untuk mengoptimalkan PDB per kapita:

1. **Investasi dalam Sumber Daya Manusia (SDM)**
Peningkatan kualitas tenaga kerja secara langsung meningkatkan produktivitas dan inovasi.
 - **Pendidikan Berkualitas:** Memastikan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, serta pendidikan tinggi dan pelatihan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
 - **Kesehatan dan Nutrisi:** Investasi dalam layanan kesehatan, sanitasi, dan nutrisi untuk memastikan populasi yang sehat dan produktif.
2. **Peningkatan Produktivitas Bangsa**
Meningkatkan output per pekerja adalah kunci pertumbuhan PDB per kapita.
 - **Inovasi dan Teknologi:** Mendorong penelitian dan pengembangan (R&D), serta adopsi teknologi baru di berbagai sektor ekonomi.
 - **Infrastruktur Modern:** Membangun dan memelihara infrastruktur fisik yang efisien (transportasi, energi, komunikasi) untuk mengurangi biaya logistik dan memfasilitasi aliran barang serta informasi.
3. **Lingkungan Ekonomi yang Kondusif**
Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan.
 - **Stabilitas Makroekonomi:** Menjaga inflasi tetap rendah, stabilitas mata uang, dan kebijakan fiskal yang bertanggung jawab untuk menciptakan kepastian bagi investor.
 - **Tata Kelola yang Baik dan Aturan Hukum:** Memastikan pemerintahan yang transparan, penegakan kontrak yang adil, dan memerangi korupsi untuk meningkatkan kepercayaan bisnis dan investasi.
 - **Keterbukaan Perdagangan:** Mengurangi hambatan perdagangan dan mendorong ekspor untuk mengakses pasar yang lebih besar dan spesialisasi dalam produksi yang efisien.
4. **Industrialisasi dan Diversifikasi Ekonomi**
 - **Pembangunan Sektor Manufaktur:** Sektor industri sering kali menawarkan produktivitas yang lebih tinggi dan potensi ekspor yang lebih besar dibandingkan pertanian subsisten.
 - **Diversifikasi:** Mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa komoditas (misalnya, minyak atau gas alam) untuk melindungi ekonomi dari volatilitas harga global.
5. **Mengelola / Mengendalikan Pertumbuhan Populasi**
Meskipun fokus utama adalah meningkatkan PDB total, mengelola tingkat pertumbuhan populasi juga penting agar peningkatan PDB dibagi di antara lebih sedikit orang.
 - **Program Keluarga Berencana:** Menyediakan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan keluarga berencana secara sukarela.

Dengan kombinasi strategi tersebut, suatu negara dapat menciptakan jalur pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan PDB per kapita, yang pada akhirnya mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi bagi warganya.

Jayalah Infonesia !